

# **MENJAGA PANGAN, MERAWAT MASA DEPAN**

**Kompilasi Karya Nominasi  
dan Pemenang Penghargaan  
Liputan Media Terbaik  
tentang Isu Keadilan Pangan -  
GROW Award 2017**

Penerbitan buku ini didukung oleh Oxfam. Semua pandangan dan pendapat dalam buku ini adalah pandangan dan pendapat para penulis serta tidak sekali-kali mencerminkan atau mewakili pendapat atau pandangan Oxfam.

**MENJAGA PANGAN, MERAWAT MASA DEPAN**  
**Kompilasi Karya Nominasi Dan Pemenang Penghargaan**  
**Liputan Media Terbaik Tentang Isu Keadilan Pangan -**  
**GROW Award 2017**

**Dewan Juri**

KATEGORI CETAK-ONLINE

Harry Surjadi, Jurnalis Senior

Tejo Wayu Jatmiko, ADS

Renjani Pusposari, AJI

Taufiqul Mujib, OXFAM

KATEGORI FOTO

Ng Swan Ti, PannaFoto Institute

Arbain Rambey, Kompas

Rully Kesumah, Tempo

Irwan Firdaus, OXFAM

**Penyelaras Akhir**

Bayu Wardhana

Febrina Galuh Permanasari

**ISBN 978-979-3530-32-1**

**Cetakan Pertama:** Juli 2017

**Penerbit:**



**AJI INDONESIA**

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Jalan Kembang Raya no. 6 Kwitang, Senen

Jakarta Pusat 10240

www.aji.or.id twitter: @AJIIndonesia

**Didukung oleh:**



# PENGANTAR

**A**liansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan OXFAM kembali menerbitkan buku Kompilasi Karya Nominasi dan Pemenang Penghargaan Media Terbaik tentang Isu Keadilan Pangan tahun 2017. Buku ini hadir melengkapi rangkaian kegiatan penghargaan untuk liputan media terbaik tentang isu keadilan pangan, baik untuk peserta jurnalis media cetak, online maupun jurnalis foto.

Sebanyak 105 artikel kategori cetak dan online serta 73 karya foto yang telah dipublikasikan media massa pada periode waktu 1 Maret sampai 30 Mei 2017 telah diseleksi oleh dewan juri dan mendapat penilaian.

Cukup beragam tema yang masuk. Secara garis besar, para jurnalis memotret kondisi riil yang dihadapi masyarakat terkait keberagaman pangan, potensi sumber pangan lokal hingga ancaman yang timbul akibat penggunaan lahan untuk kawasan industri. Dari sejumlah isu tersebut, isu keberagaman pangan di Indonesia paling banyak diungkap, mengingat Indonesia mempunyai kekayaan alam yang melimpah dan banyak bahan makanan yang beraneka ragam.

Dibanding dengan karya-karya tahun lalu, ada peningkatan pada ketersebaran isu dan jangkauan liputan. Bila tahun lalu dominasi karya adalah aneka ragam makanan produk lokal. Kini masuk sejumlah isu baru, terkait ancaman lahan dan penurunan produktivitas. Sedangkan jangkauan liputan, tahun ini hampir mewakili seluruh Indonesia.

Keberagaman isu keadilan pangan ini layak untuk mendapat apresiasi, karena jurnalis tidak hanya mengembangkan isu berdasarkan apa yang disampaikan pejabat publik. Namun, mulai banyak isu baru hasil penggalian para jurnalis setelah mencermati fenomena baru. Dan harapan kami, jurnalis akan terus merekam dan menceritakan kondisi terbaru yang berada di tengah masyarakat.

Hal ini sesuai tujuan AJI menyelenggarakan kegiatan ini, untuk mendorong kepedulian jurnalis terkait isu keadilan pangan. Apresiasi layak diberikan kepada para jurnalis yang konsisten menulis, melaporkan atau memotret isu-isu terkait keadilan pangan di Indonesia.

Atas terselenggaranya acara ini, AJI Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada OXFAM selaku mitra, seluruh dewan juri baik cetak maupun foto. Juga seluruh staf dan pengurus AJI Indonesia atas terselenggaranya kegiatan ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

**Suwarjono**

Ketua Umum AJI Indonesia

# KATA PENGANTAR OXFAM

Untuk kesekian kalinya, AJI Indonesia didukung oleh Oxfam menerbitkan buku yang secara khusus mengangkat tema tentang keadilan pangan. Kenapa keadilan pangan?

Di tahun 2016, *The Economic Intelligence Unit* melansir *Global Food Security Index* yang menempatkan Indonesia di peringkat ke 71 dari 113 negara. Indonesia bisa memperbaiki peringkat secara signifikan dibandingkan posisi pada 2014 dan 2015 yang sempat merosot di peringkat 76. Tiga hal utama yang diukur sebagai indikator penilaian, yaitu keterjangkauan, ketersediaan, dan kualitas serta keamanan.

Kendati demikian, kenaikan peringkat ini kita harapkan bukan justru membuat kita lengah, melainkan semakin memotivasi perbaikan ke depan. Pasalnya, masih banyak pekerjaan rumah yang sudah menanti untuk segera dirampungkan. Beberapa tantangan yang harus dijawab seperti perubahan iklim, gejolak harga pangan global, dan akses terhadap tanah atau sumberdaya produktif lainnya, terutama bagi perempuan.

Karenanya, Oxfam berupaya senantiasa berkolaborasi bersama sejumlah pihak guna mendorong terwujudnya keadilan pangan di Indonesia. Mendorong bagaimana setiap laki-laki, perempuan dan anak, sendiri maupun di dalam komunitasnya bersama yang lain memiliki akses fisik dan ekonomi setiap saat, untuk pangan yang layak.

Cita-cita tersebut mensyaratkan, paling tidak, tiga

hal sebagai indikator pencapaian yaitu, aksesibilitas, kesinambungan dan kecukupan. Dalam konteks kecukupan, pemaknaannya tidak semata-mata ketersediaan, namun juga kualitas dan penerimaan secara budaya.

Melalui buku yang diterbitkan oleh AJI Indonesia ini, kita dibantu terpapar dengan kisah-kisah terkait pangan dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Mulai dari cerita keompok perempuan yang melawan stigma kemiskinan dengan mengembangkan potensi pangan lokal di Jombang-Jawa Timur, hingga diskursus soal kelembagaan pangan yang ideal.

Lantas, apa kaitan kisah-kisah tersebut dengan upaya mendorong keadilan pangan? Informasi yang bebas dan memadai adalah krusial untuk perlindungan hak-hak dasar dan menjadi elemen pembangun bagi pemajuan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Dalam situasi yang ideal, seseorang berharap media adalah mandiri dari kontrol eksternal dalam laporan mereka, kritis terhadap otoritas publik serta konsentrasi kekuasaan publik, dan akhirnya konstruktif dalam menyediakan proses dan sarana bagi ide dan saran untuk perbaikan kebijakan, termasuk soal pangan.

Akhirnya, tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada tim AJI Indonesia yang telah berjuang mengkampanyekan tema keadilan pangan, salah satunya dengan menyusun buku ini. Dan kepada para pembaca, kami ucapkan selamat membaca! Semoga buku ini akan bermanfaat adanya.

Jakarta, 7 Juli 2017

**Budi Kuncoro**

Country Director Oxfam di Indonesia

# KATA PENGANTAR DEWAN JURI KATEGORI CETAK/ONLINE

**M**enelusik sejarahnya, di masa lalu pangan bersifat sangat lokal. Manusia memenuhi kebutuhannya dengan berburu atau membudidayakan sumber pangan. Sehingga jarak dan waktu perjalanan antara sumber pangan dan konsumennya sangat dekat. Perubahan drastis terjadi di abad awal saat perdagangan rempah-rempah dimulai. Sistem pangan yang bersifat lokal berubah mengglobal. Dan pangan yang awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, berubah menjadi produk perdagangan dan industri.

Era modern menjadikan situasi pangan semakin rumit karena merupakan kelindan pengaruh politik ekonomi, modal, energi, lingkungan serta teknologi. Kerumitan ini telah menghasilkan paradoks pangan, di satu sisi ada 800 juta manusia penghuni bumi yang mengalami kelaparan, sementara ada dua milyar lainnya mengalami obesitas dan masalah kesehatan. Ini menunjukkan telah terjadi ketimpangan atau ketidakadilan pangan di dunia ini.

Situasi ketimpangan atau ketidakadilan pangan tersebut masih sangat jarang diketahui oleh masyarakat. Bahkan mantan Direktur Jenderal Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), Jacques Diouf, mengingatkan bahwa masalah kelaparan (dan pangan) bukan sekedar masalah keberadaan

bantuan namun tentang ketidakadilan. Banyak hal yang harus diketahui oleh masyarakat tidak hanya tentang produksi, distribusi dan konsumsinya saja, namun lebih mendalam karena pangan sejatinya adalah hak asasi manusia.

Dari sisi produksi banyak hal yang harus diketahui misalnya saat dunia berlomba menyediakan pangan, justru ketersediaan dan ketimpangan kepemilikan lahan pertanian meningkat drastis. Tidak hanya di darat, di lautpun terjadi dengan adanya pengkaplingan. Angka menurunnya jumlah petani juga semakin laju, sementara benih dan racun kimia penumpas hama hanya dikuasai oleh segelintir perusahaan. Masih ada lagi, tidak diahraginya peran perempuan, menuanya usia petani dan nelayan serta minimnya keinginan anak muda masuk ke pertanian dan perikanan. Dan seterusnya.

Perubahan pola konsumsi pun ternyata sangat mempengaruhi ketersediaan pangan dunia. Contohnya proses *westernisasi* yakni pola konsumsi yang cenderung bertumpu pada daging dan gandum saja. Akibatnya terjadi peningkatan konsumsi biji-bijian oleh ternak, terutama sapi, demi meningkatkan produksi daging. Banyak pakar sepakat bahwa cara ini sangat tidak efisien dalam meningkatkan ketersediaan protein hewani dan kalori. Demikian juga dalam hal penyediaan karbohidrat, terjadi peningkatan konsumsi gandum dan tepung-tepungan turunannya secara luar biasa. Indonesia menjadi salah satu contoh ekstrim, meski tidak dapat menghasilkan gandum angka impor gandum sudah mencapai 10,5 juta ton di tahun 2016, dengan laju peningkatan konsumsi sekitar 7% pertahun (Aptindo, 2016). Sayangnya meningkatnya angka konsumsi juga dibarengi dengan meroketnya harga gandum dan biji-bijian sumber karbo dunia.

Kompetisi terhadap biji-bijian pun semakin meningkat sejalan dengan ekspansi lahan perkebunan untuk penyediaan

bahan bakar yang bersumber dari biji-bijian (*biofuel*). Kalau dalam penyediaan daging manusia berkompetisi dengan sapi, di sini berkompetisi dengan mobil. Meroketnya harga biji-bijian, konsumsi daging dan gugatan terhadap *biofuel* hanyalah sekedar contoh dari wajah multidimensi pangan yang mempengaruhi kita. Belum ditambah faktor perubahan iklim, spekulasi dan kolusi pasar pangan, tata kelola perdagangan, perkembangan teknologi dan lainnya.

Banyak upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang keadilan pangan, agar ketidakadilan yang sekarang terjadi bisa dihentikan. Salah satunya adalah menyediakan informasi yang tepat dan mendidik oleh media. Tidak lah mudah memang, namun bisa. Diperlukan upaya serius dan terus menerus untuk bisa mengkomunikasikan secara benar tentang pangan. Seri tulisan hasil seleksi dalam rangka GROW AWARD hasil kerjasama Oxfam di Indonesia dan AJI berikut ini merupakan contoh yang layak untuk dikembangkan. Masih banyak hal yang bisa digali dari situasi pangan di lapangan seperti : kuasa pangan terkait kelas, gender, dan ras; sejarah pangan; akses dan kontrol terhadap lahan dan sumber agraria lainnya; pengelolaan produk melalui koperasi atau lembaga ala petani; politik ekonomi pangan; upah; demokratisasi pertanian; agroekologi dan masih banyak lagi.

Semoga kesepuluh tulisan ini bisa menginspirasi banyak pihak dan meningkatkan literasi tentang pangan kita. Karena pangan adalah budaya, maka pangan adalah kita...

Selamat membaca

**Tejo Wahyu Jatmiko**



# KATA PENGANTAR

## DEWAN JURI

### KATEGORI FOTO

**M**edia massa memiliki peran penting dalam mendidik masyarakat melalui informasi dan pemberitaan suatu isu, termasuk isu keadilan pangan. Demi mencapai peran tersebut, industri media massa perlu memberikan kesempatan dan fasilitas yang memadai pada sumber daya manusia yang bekerja didalamnya, termasuk para wartawan foto. Selama wartawan foto hanya dituntut memproduksi gambar dan dibebani rutinitas harian, maka akan sulit melihat liputan-liputan yang memiliki kekuatan visual dan kedalaman berita yang diharapkan dapat menggugah emosi dan menginspirasi masyarakat.

Demikian pula foto-foto yang harus dijuri dalam kegiatan “Penghargaan untuk Liputan Media Terbaik tentang Isu Keadilan Pangan, *GROW Award 2017*”. Selama proses penjurian yang mempertimbangkan aspek ide cerita/isu terkait keadilan pangan, teknis fotografi termasuk kreativitas sudut pandang dan komposisi serta berita foto (*caption*), para juri bersepakat bahwa:

- Sebagian besar foto belum menggambarkan isu keadilan pangan. Secara visual, aktivitas petani di sawah dan padi mendominasi foto-foto yang masuk dalam penjurian.
- Masih banyak penulisan berita foto yang tidak sesuai

dengan ketentuan penulisan berita foto didalam foto jurnalistik; beberapa tidak menunjukkan relasi foto dengan isu keadilan pangan.

- Pewarta foto perlu memperkuat pemahaman atas isu keadilan pangan untuk memperkaya ide cerita, menuliskan berita foto yang menambah informasi dan kedalaman pemberitaan foto-nya.

Melalui debat dan pertimbangan-pertimbangan, para juri menentukan 10 foto yang dianggap mewakili keberagaman penyampaian isu keadilan pangan secara visual, didukung oleh berita foto yang mendukung foto-nya.

Semoga foto-foto terpilih ini dapat memenuhi peran yang diemban media massa termasuk pewarta foto, memberikan informasi yang mendidik sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan terkait lebih peduli dan terlibat dalam mengupayakan keadilan pangan di Indonesia.

**Ng Swan Ti**

# KATEGORI CETAK – ONLINE

NOMINASI :

<b>Kisah Ibu-ibu ‘Dusun Miskin’ yang Menanam Tanaman Liar di Jombang</b> .....	15
Christine Franciska	
<b>Memuliakan Keباikan Alam</b> .....	27
Cornellius Helmi	
<b>Menjaga Lumbung Tanah Lombok</b> .....	35
Abdul Latief Apriaman	
<b>Mitigasi Paceklik Pangan Dimiliki oleh Komunitas Adat Bonokeling, Seperti Apa?</b> .....	41
L. Darmawan	
<b>Sagu yang Mulai Tergusur di Mentawai</b> .....	49
Febrianti	
<b>Berburu dan Meramu Pangan untuk Bertahan</b> .....	57
M Ramond Eka Putra Usman	
<b>Para Petani yang Terbuang dari Tanah Moyang</b> .....	67
Eka Handriana	
<b>Para Srikandi Penjaga Bumi</b> .....	79
Anang Zakaria	
<b>Penentang PLTU dari Alas Roban</b> .....	97
Sasmito	
<b>Tambang Semen Membelah Rembang (1)</b> .....	107
<b>Tambang Semen Membelah Rembang (2)</b> .....	123
Nurika Manan	

PEMENANG TERBAIK:

## **Kisah Ibu-ibu ‘Dusun Miskin’ yang Menanam Tanaman Liar di Jombang**

Christine Franciska



**Christine Franciska**

Saat ini bekerja sebagai Produser/Multimedia Journalist di BBC Indonesia. Ia berdomisili di Jakarta dan sudah menjadi jurnalis sejak tahun 2008.

# KISAH IBU-IBU ‘DUSUN MISKIN’ YANG MENANAM TANAMAN LIAR DI JOMBANG

Oleh: **CHRISTINE FRANCISKA**

Dimuat dalam [www.bbc.com/indonesia](http://www.bbc.com/indonesia) pada 17 Mei 2016

*Sebagian orang menganggapnya sebagai hama, makanan kambing, atau makanan orang miskin. Tapi di tangan ibu-ibu di Dusun Mendira, tanaman liar dibudidayakan dan diolah menjadi menu-menu bernutrisi di meja makan.*

**D**usun Mendira dikenal sebagai salah satu dusun paling miskin di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Letaknya yang berada di atas bukit, dengan jalan menanjak yang rusak, rumah-rumah kayu, serta pekerjaan warga yang tak menentu di kebun, membuat orang-orang di luar dusun kerap mencibir.

“Dulu itu kita itu *dikata-katain*, itu *loh* anak gunung,” kata Anti Suparni, 44, ibu dua anak yang tinggal di Desa Mendira.

“Karena ini dulu di pelosok sekali, hutan lebat semua, hewan-hewan pun masih suka ke desa, makanya dibilang dusun miskin. Kita semua cari makan di hutan.”

Sebutan-sebutan itu masih melekat di Dusun Mendira ketika Hayu Dyah Patria, 35, seorang peneliti tanaman liar, berkunjung ke sana tiga tahun silam.



Banyak rumah masih beralas tanah dan bertembok kayu.

Tapi bagi Hayu apa yang dilihatnya di dusun itu jauh dari kesan miskin.

Mereka punya air segar tak terbatas yang mengalir dari gunung, tanahnya gembur, dan tanaman-tanaman liar tumbuh sendirinya lebat di kebun. Di hutan, yang letaknya begitu dekat dari rumah, segala keanekaragaman hayati menunggu untuk dimanfaatkan.

“Saya justru tidak melihat kemiskinan sama sekali. Jika kemudian definisi miskin adalah berarti rumah tidak beralas semen atau keramik, menurut saya itu bukan esensinya. Ini adalah daerah yang sangat kaya,” katanya.

Dari kunjungan itu, Hayu mulai mengenal ibu-ibu, yang dengan semangat luar biasa, ingin memajukan tempat tinggalnya. Lantas, dimulailah kegiatan berkebun dengan memanfaatkan tanaman-tanaman liar, yang biasa mereka sepelekan.

“Saya tanya ke ibu-ibu: sebutkan apapun tanaman yang bisa dimakan. Dari situ kemudian, ibu-ibu ini langsung

menyebut, 'oh ada Sintrong, Pegagan, Bayam Banci, Suwek, Gadung...'"



Hutan Hanya sejengkal dari rumah mereka



Pemandangan Desa Medira, Kecamatan Wonosalam, Jombang.

“Dan itu jumlahnya bisa 100 jenis tanaman, disebut dalam waktu satu jam. Mereka seakan mengeluarkan semua isi di kepala. Saya tulis semua dan saya tempelkan di dinding dan dari situ, ibu-ibu bisa melihat ternyata banyak sekali yang bisa

dikembangkan, tidak hanya alpukat atau durian.”

“Mereka mulai sedikit berubah cara berpikirnya, ‘kita bukan orang miskin sebetulnya.’”

## **BERKEBUN DAN MENELITI NUTRISI**



Delapan ibu-ibu di Dusun Mendira lalu menanam 40 jenis tanaman pangan liar di kebun seluas 3.000 meter persegi setahap demi setahap. Hasilnya, dibagi-bagi untuk dapur mereka sendiri dan sisanya dijual di pasar organik di Surabaya satu bulan sekali.

Mereka tak peduli ketika orang sesama dusun mencibir atau memandang dengan geli. Banyak orang berpikir, ibu-ibu ini harusnya menanam cokelat, cengkeh, kemiri, atau durian yang bisa dijual di pasar, bukan tanaman-tanaman yang biasa dibuang itu.

“Buat apa itu? Buat makan kambing sama sapi? Kok ditanam?” kata lin Kosaini, 42, menirukan perkataan tetangga-tetangganya.

Tapi apa yang tidak diketahui oleh warga dusun lain adalah fakta bahwa tanaman sepele itu punya nutrisi yang

tidak kalah dengan kangkung, wortel, atau tomat yang sering dijual di pasar.

Krokot misalnya, yang tumbuh liar dan biasa untuk makan ayam atau jangkrik, ternyata kaya dengan vitamin C dan A, kata Hayu. “Terutama asam lemak omega 3 yang bagus untuk jantung. Ini bagus juga untuk anak-anak yang punya keterbelakangan mental.”



Krokot (*Portulaca oleracea*)



Jelatang atau Stinging nettle (*Urtica dioica*).

Di kota besar macam Jakarta, krokot juga banyak ditemukan di sela-sela trotoar yang diinjak-injak pejalan kaki.

Kandungan nutrisi inilah yang teliti oleh Hayu melalui organisasi nirlaba yang didirikannya Mantasa. Hasil riset kemudian selalu didiskusikan bersama ibu-ibu Dusun Mendira.

“Ini Jelatang Bu, kalau di sini namanya Lateng ya?” kata Hayu kepada Iin (yang akrab dipanggil Saini) saat mereka bertemu untuk berkegiatan di kebun.

“Kalau di sini dibuang *aja*, ini *gak* dimakan sama sekali,” ujar Saini menanggapi. Bulu-bulu di bagian batang membuat kulit gatal jika tersentuh, katanya.

“Ini bernutrisi, terutama kalsiumnya, ada vitamin A juga. Satu genggam setara dengan satu wortel besar. Ada vitamin C dan vitamin D juga,” ujar Hayu.

“Kalau sudah tahu, ya mungkin bisa dikonsumsi!” kata Saini dengan semangat.

## **MINIM DANA RISET**

Hingga saat ini, Mantasa telah mencatat lebih dari 400 jenis tanaman yang bisa dimakan, tetapi tidak semuanya dimanfaatkan karena sudah jarang ditemukan.

Sedangkan yang sudah diteliti kandungan nutrisinya ada sekitar 10 jenis makanan, seperti sintrong, rukem, dan sembukan - beberapa di antaranya masih dikonsumsi tetapi sudah mulai ditinggalkan.

Jumlah ini, diakui oleh Hayu, masih minim. Padahal, riset seperti ini sangat berguna untuk menggali potensi tanaman-tanaman tersebut.

“Sayangnya, semangat ibu-ibu di dusun tidak dibarengi

dengan data ilmiah yang memadai, setiap kami mengajukan data penelitian, mereka selalu bilang ini tidak memiliki nilai ekonomi seperti produk hortikultura lain,” kata Hayu Dyah.

Beberapa proposal penelitian yang diajukan pada para donor biasanya ditanggapi dingin dengan kalimat seadanya, “Nanti saja dulu.”



Saini, Hayu Dyah, dan Tri memperlihatkan tanaman liar yang akan diolah menjadi sayur.



Mantasa telah mencatat lebih dari 400 jenis tanaman yang bisa dimakan.

## KHAS IBU-IBU

Sangat mengasyikan bertemu delapan ibu-ibu dusun dan mengamati kegiatan mereka. Di kebun, mereka gemar bercanda, menertawai diri sendiri, dan menggoda kawannya - yang ternyata baru menjadi pengantin baru.

Begitu sang suami - yang pulang dari hutan - melintas mengendarai motor dengan setumpuk ilalang makanan sapi di belakangnya, Saini, Anti, juga Tri sibuk menggoda Mistin yang tak berdaya merespons godaan itu, dan akhirnya hanya tersipu malu.

“Mereka lucu, hahaha,” kata Hayu mengomentari pengalamannya bekerja dengan ibu-ibu dusun.



Hayu Dyah Patria tertarik pada pangan lokal sejak kuliah di Fakultas Teknologi Pangan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

“Ngobrolnya itu gak karu-karuan ke mana-mana, tetapi pasti kembali lagi ke topik awal. Kalau rapat di kota (itu) kesannya tidak efektif banget. Tapi kalau dengan ibu-ibu ini, *enggak* membosankan buat saya.”

“Pertemuan 15 menit bisa dua jam karena itu. Tapi saya

belajar tidak terlalu kaku, saya belajar untuk berkompromi dengan cara-cara komunikasi mereka. Itu sih kenapa tidak pernah bosan,” ujar peneliti kelahiran Gresik itu.

## VARIASI DI MEJA MAKAN

Upaya yang dilakukan delapan ibu dusun Mendira saat ini memang belum menghasilkan uang, tetapi perubahan sudah terjadi di meja makan.

Anti mengaku mulai mengerti kandungan nutrisi dari apa yang dia masak di dapur. “Semakin semangat untuk *nanam*, *ngolah*, makannya juga. Anak-anak juga diajari ini kandungan gizinya lebih banyak dibanding jajan-jajanan.”



Berfoto bersama ibu-ibu dusun di Jombang, Jawa Timur.

“Kita ingin nanti anak-anak kita juga meneruskan dan mengembangkan tanaman-tanaman yang tadinya liar, karena banyak manfaatnya. Kenapa kita susah-susah beli, kenapa enggak memanfaatkan yang ada, di hutan sudah disediakan,” sambung Anti.

Bagi Hayu, harapannya untuk desa ini hanya satu.

“Saya berhadap ibu-ibunya bisa mandiri, bisa mengelola dusun ini, menjaga alam mereka, karena ibu-ibu inilah yang menjadi tulang punggung kedaulatan pangan sebuah bangsa,” katanya.





**Cornelius Helmy**

Jurnalis asal Bandung bekerja untuk Harian Kompas. Pria kelahiran Sukabumi ini bisa dihubungi melalui email [opetmyown@yahoo.com](mailto:opetmyown@yahoo.com)

# SOSOK: NISSA WARGADIPURA MEMULIAKAN KEBAIKAN ALAM

Oleh: **CORNELLIUS HELMI**

Dimuat dalam KOMPAS pada 04-10-2016

*"Sistem monokultur, terutama hortikultura, sangat merugikan saat gagal panen. Petani miskin bisa menjual rumah untuk melunasi utang kepada pemilik modal."*

**D**elapan tahun terakhir, Nissa Wargadipura (44) gencar mempromosikan makanan sehat. Bersama suaminya, ia mendirikan Pesantren Ekologi Ath Thaariq di Sukagalih, Garut, Jawa Barat. Para santri di sana tak hanya mengaji ilmu agama, tetapi juga belajar pertanian, termasuk mengolah makanan lokal.

Nasi berwarna coklat keunguan itu baru saja masak setelah dibakar dalam oven. Kepulan asap melayang di udara. Dari dapur berukuran 6 meter x 4 meter itu, harum rempah-rempah tercium menggugah selera.

"Ini nasi tutug oncom. Warna kecoklatan berasal dari oncom, fermentasi kacang kedelai. Warna ungu diambil dari bunga telang. Satu hari sejak banjir bandang Garut (20 September), kami membuatnya untuk pengungsi dan relawan

bencana,” kata Nissa di rumahnya di Sukagalih, Tarogong Kidul, Garut, Minggu (25/9) lalu.

Nissa turut membantu menyediakan makanan untuk para pengungsi dan relawan banjir bandang Garut. Setiap hari, 500 nasi bungkus tutug oncom dibuatnya. Ada 30 santri dan warga sekitar pesantren yang membantunya.

Ide itu muncul dari minimnya pemenuhan makanan bergizi bagi pengungsi di sejumlah daerah bencana. Makanan cepat saji saja, seperti mi instan, bukanlah pilihan bijaksana bagi para pengungsi yang kelelahan, rawan sakit, dan tengah terguncang emosinya.

“Lewat tutug oncom tanpa bahan pengawet ini, kami ingin ikut memberi energi agar pengungsi atau relawan bencana terus sehat dan tetap semangat,” katanya.

## **UNTUK ALAM**

Nissa bukan koki. Di Garut, ia dikenal sebagai penggiat pangan berbasis kearifan lokal. Ayahnya, mantri pertanian di Garut, adalah orang pertama yang memperkenalkan Nissa kepada dunia itu. Sejak itu, ia doyan belajar otodidak cara bertani organik dan mempromosikan bahan makanan sehat.

Pada tahun 2008, ia menegaskan pilihan hidupnya. Setelah mundur dari Serikat Petani Pasundan, lembaga yang ikut ia dirikan untuk mendampingi masalah konflik agraria. Nissa mendirikan Pesantren Ekologi Ath Thaariq di Sukagalih, Garut. Bersama suaminya, Ibang Lukmanurdin, dia mencurahkan perhatian untuk alam dan lingkungan yang sehat.

Berbeda dengan pesantren lain, kegiatan di Ath Thaariq bukan sekadar mengaji. Konsep bertani ala masyarakat Sunda diperkenalkan kepada santrinya. Perempuan itu yakin, menghargai lingkungan adalah ungkapan syukur kepada Allah.

Lahan 7.500 meter persegi di sekitar pesantren menjadi laboratorium sekaligus tempat praktiknya. Melalui lahan itu, konsep kedaulatan pangan diterapkan bersama para santri.

Dia mencontohkan sawah milik pesantren berukuran 6.000 meter persegi yang dibagi menjadi enam petak. Setiap petak ditanami padi dengan perbedaan usia sekitar sebulan. Panen pun bisa berlangsung terus-menerus. Dengan penanaman organik, dari satu petak sawah dihasilkan sekitar 2 ton sekali panen.

Sistem pertanian polikultur juga diterapkan. Selain padi, ditanam pula sumber karbohidrat lain, seperti ganyong, talas, dan pisang muda. Ada juga sayuran kenikir, pegagan, ruku-ruku, dan daun kelor. Beligo, labu kuning, tomat rantan, dan ceri monyet pun ditanam.

Menurut Nissa, sistem itu turut menjamin ketersediaan beragam pangan secara berkelanjutan. Praktik ini menjadi otokritik atas sistem pertanian monokultur petani yang kerap sekadar memenuhi permintaan pasar.

"Sistem monokultur, terutama hortikultura, sangat merugikan saat gagal panen. Petani miskin bisa menjual rumah untuk melunasi utang kepada pemilik modal," katanya.

Bibit tanamannya pun dikembangkan sendiri. Kini ada 450 benih yang dikembangkan, mulai dari padi Ciherang dan Sarinah hingga bunga telang ungu dan beligo.

Misinya tak berhenti sampai di sana. Selain menanam dan panen, para santri juga diajak mengolah hasil panen menjadi bahan makanan. Nissa yakin, dengan cara itu, mereka akan paham gizi dan khasiat makanan yang akan dikonsumsi.

Semua teori itu terlihat di tutug oncom yang dibuatnya. Selain oncom, semua bahan ditanam di pekarangan pesantren. Beras organik sehat tanpa pestisida. Bunga telang yang

ditanam berkhasiat sebagai obat mata.

“Kami juga memasukkan serai dan jahe. Keduanya jadi obat rematik dan penghangat tubuh untuk membantu pengungsi melewati dinginnya malam di pengungsian,” katanya.

Daun kenikir yang dicampur dalam telur orak-arik juga memberi manfaat ganda. Selain melezatkan makanan, daun itu juga berkhasiat mencegah serangan kanker.

Nunung Nurhasanah (19), santri asal Rancabuaya, Garut, mengatakan, pengetahuannya terkait bahan-bahan ramah lingkungan semakin bertambah setiap hari. Ia tidak menyangka bunga telang ampuh menjadi obat alami untuk mencegah sakit mata.

“Sebelumnya, saya hanya tahu bunga telang cocok untuk hiasan di meja,” katanya.

Teteng (70), warga Sukagalih, Garut, juga seperti bernostalgia dengan nasi tutug oncom bercampur kenikir itu. Dulu, menu itu pernah menjadi makanan favorit banyak petani sebagai bekal ke sawah.

Namun, seiring perkembangan zaman dan alih fungsi sawah menjadi perumahan, tak banyak warga Garut ingin jadi petani. Bekal tutug oncom kenikir pun perlahan dilupakan. “Di pesantren ini, saya diingatkan kembali pada makanan sederhana tapi penuh gizi ini,” ucapnya.

## **MANCANEGERA**

Tak terasa, kini pilihan Nissa mempromosikan penanaman dan pengolahan bahan makanan sehat sudah berjalan delapan tahun. Ada 500 santri dari sejumlah daerah di Indonesia yang pernah belajar di Ath Thaariq.

"Hampir semua santri lulusan Ath Thaariq kini berkarya membangun tanah kelahirannya, baik melalui lembaga pendidikan maupun pertanian organik," katanya.

Mahasiswa dan peneliti dari mancanegara juga pernah ikut mengenyam ilmu yang sama. Datang dari Filipina, Myanmar, Thailand, hingga Jerman, mereka belajar menanam dan mengonsumsi makanan sehat ala masyarakat Sunda.

Ketekunan pada kemandirian pangan organik berbasis kearifan lokal juga membuatnya dilirik organisasi pangan kelas dunia. Pada Maret 2016, ia diundang mendalami pertanian organik di The Navdanya Biodiversity Conservation Farm di India. Lalu, pada 7 Oktober 2016, ia diundang Worldwide Opportunities on Organic Farm ke Nepal dan Butan.

"Ini kesempatan besar untuk mendalami dan membagikan ilmu pertanian organik kepada semua orang," ujarnya.

Saat Nissa bersemangat memaparkan cara bertaninya, kedatangan dua relawan asal Garut dan Subang dengan cepat menghentikan ide-ide pertanian mandiri keluar lebih banyak. Saat itu, jam makan siang sudah tiba. Jarum jam menunjukkan pukul 13.00.

Menurut Nissa, keduanya rutin ditugaskan mengambil tutug oncom untuk makan siang bagi relawan yang ikut membersihkan infrastruktur umum yang terdampak banjir bandang Garut, seperti sekolah dan fasilitas kesehatan.

"*Nyandak sabaraha ayeuna (Ambil berapa sekarang)?*" tanya Nissa.

"*Ayeuna mah opat puluh, Bu. Tong seuur teuing, eta ge cekap pisan (Sekarang empat puluh, Bu. Jangan terlalu banyak, itu saja sudah cukup),*" jawab seorang relawan.

Nissa segera bangkit dari duduknya. Sebelum pergi ke dapur, dia meminta izin memutus pembicaraan. "Saya tinggal

dulu sebentar. Mereka adalah orang-orang luar biasa yang harus terus makan sehat agar tenaganya bisa membantu semakin banyak korban banjir bandang,” katanya.

NISSA WARGADIPURA

Lahir: Garut, 23 Febuari 1972

Suami: Ibang Lukmanurdin

Anak:

- Salwaa Khanzaa (15)
- Akhfa Nazhat (12)
- Qaramitha Mulia (5)

Pendidikan :

- SD Bungbulang II Garut (lulus 1984)
- SMPN Cibatu, Garut (1987)
- SMAN Cibatu, Garut (1990)





**Abdul Latif Apriaman**

Jurnalis yang berdomisili di Ampenan, NTB ini sekarang bekerja sebagai kontributor Tempo.co. Ia juga menjadi Pengurus Aji Koordinator Wilayah Bali, NTB, dan NTT.

# MENJAGA LUMBUNG TANAH LOMBOK

Oleh: **ABDUL LATIEF APRIAMAN**

Dimuat dalam Tempo.co pada 27 Mei 2017

*“Tidak semua padi dalam alang bisa dimakan. Harus ada yang disisakan untuk cadangan, termasuk untuk bibit.”*

**Mataram** - Bangunan itu tampak asing di tengah kepungan rumah-rumah penduduk di Dusun Ketangga, Desa Batujai, Lombok Tengah. Empat tiang bundar berdiameter sekitar 25 sentimeter masih kokoh menyangga sebuah ruang berinding anyaman pagar bambu. Dari warna kayunya, usia bangunan itu sudah tak lagi muda.

“Ini satu-satunya alang yang masih tersisa di dusun ini. Yang lain sudah rusak,” ujar Hajjah Hikmah, 65 tahun, warga Batujai, Minggu, 14 Mei 2017. Alang yang dimaksud Hikmah adalah lumbung tradisional yang berdiri di depan rumahnya. Dari 231 kepala keluarga di Dusun Ketangga, hanya Hikmah seorang yang masih memiliki lumbung tradisional. Kalaupun ada warga lain yang memiliki, fungsinya sudah berubah, tak lagi sebagai tempat penyimpanan padi.

Hikmah tak tahu persis, kapan lumbung itu dibangun. “Alang itu hadiah pernikahan kami dari orang tua. Dulu atapnya adalah ilalang, tapi diganti seng karena ilalang sudah sulit didapat,” ujarnya. Karena nilai sejarah itulah Hikmah

mempertahankan lumbung miliknya. Dari lumbung itu, dia dan almarhum suaminya, Haji Akmal menghidupi dan menyekolahkan lima orang anaknya hingga perguruan tinggi.

Bangunan lumbung terdiri dari dua bagian. Bagian bawah terdapat lelasah, semacam para-para yang digunakan untuk menenun atau menerima tetamu. Bagian atasnya, ruang penampungan berdinding bambu, beratap ilalang. Untuk menyangga bangunan atas, digunakan empat tiang bundar. Di ujung atas tiang itu terdapat jelepeng – benda yang menyerupai piring besar. Jelepeng inilah yang membuat tikus tak akan sanggup menjangkau padi dalam ruang penampungan.

Pada mulanya, hasil panen yang disimpan dalam lumbung adalah ikatan-ikatan padi. Ikatan-ikatan itu digantung pada bilah-bilah bambu yang disusun sedemikian rupa sesuai fungsinya. “Tidak semua padi dalam alang bisa dimakan. Harus ada yang disisakan untuk cadangan, termasuk untuk bibit.” kata Hikmah.

Seiring perubahan teknologi pola tanam padi, kini yang disimpan dalam lumbung bukan lagi ikatan-ikatan padi, melainkan gabah yang dikarungkan. Menurut Hikmah, kerepotan untuk mengangkut karung-karung padi ke atas lumbung menyebabkan pemiliknya malas memfungsikan lumbung mereka.

Selain alang, di Lombok Tengah, lumbung dikenal juga dengan sebutan sambu. Senasib dengan alang, keberadaan sambu juga sudah langka. Haji Khalid, 64 tahun, petani di Dusun Tanggong, Desa Darek, masih memiliki dua buah sambu di halaman rumahnya. Khalid sudah tak lagi memfungsikan sambunya. Hanya saja dia masih memegang konsep ketahanan pangan ala sambu. Semangat menyimpan cadangan pangan, berjaga dari segala kemungkinan, terutama di musim paceklik

masih dia pertahankan. Setidaknya, Khalid tak pernah risau meskipun harga beras di pasaran sewaktu-waktu melonjak.

Mengenai hilangnya sambi di desanya, Khalid punya jawaban, "Orang-orang sekarang bilang, lebih baik menyimpan uang di dalam kantong, ketimbang menyimpannya padi di dalam sambi," ujarnya.

Pandangan pragmatis inilah yang membuat sebagian besar petani di desanya sudah tak lagi memiliki cadangan gabah di rumah. Seluruh gabah telah dibeli pengepul sesaat setelah panen, sebagian bahkan telah mengangkat utang sebelum menanam dan dibayarkan dengan gabah hasil panen mereka. Tanpa cadangan gabah, para petani yang menanam beras akan menjadi pembeli beras dengan harga yang tak bisa mereka kendalikan.

Budayawan Lombok, Lalu Agus Faturrahman mengatakan, konsep lumbung bagi masyarakat Lombok adalah konsep ketahanan pangan dan pengelolaan masa depan. Konstruksi lumbung khas Suku Sasak itu, teruji mampu menjaga kualitas padi atau gabah yang ditampungnya. Selain memiliki jelepeng yang berfungsi mencegah masuknya tikus, atap lumbung yang terbuat dari alang-alang juga membuat padi bertahan lama. "Masyarakat kita hari maunya praktis, hingga digunakanlah atap seng. Padahal atap seng membuat padi atau gabah lebih cepat rusak," Kata Agus.

Penataan padi yang tersimpan dalam lumbung, ternyata ada aturannya. Padi-padi disampirkan dalam bilah-bilah bambu dan disusun sesuai peruntukannya. Padi yang akan digunakan untuk bibit biasanya ditaruh di bagian depan kanan, di bagian paling belakang untuk tabungan sedangkan sebelah kiri untuk konsumsi. "Penempatan padi itu ada aturannya, sehingga jika akan diambil mereka sudah tahu

sesuai kebutuhan,” katanya.

Agus menyebut pola penyimpanan padi dalam lumbung itu adalah konsep ketahanan pangan dan pengelolaan masa depan masyarakat suku Sasak. Konsep ini tergambar dalam istilah-istilah pengelompokan padi yang tersimpan dalam lumbung. Ada istilah *impan kaken* yang artinya bahan konsumsi jangka pendek, *sangu aiq* untuk tabungan jangka menengah dan *sangu idup* untuk bekal hidup jangka panjang. *Sangu idup* ini meliputi investasi berupa ternak kerbau, sapi, termasuk untuk biaya pendidikan. Sayangnya nilai-nilai itu tidak diterapkan pemerintah sebagai model pola ketahanan pangan masyarakat. “Sangat miris, petani yang memproduksi padi justru menjadi konsumen beras dengan harga yang tak bisa mereka jangkau,” kata Agus.

Tentang konsep lumbung sebagai simbol ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB punya program Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di 315 desa. Pola pengembangan LPM ini menurut Kepala DKP NTB, Budi Septiani, berbeda dengan lumbung tradisional Lombok. Pemerintah membangun gudang, juga memberikan bantuan uang senilai dua ton beras. Beras-beras itu bisa dipinjam petani untuk kebutuhan konsumsi selama menunggu musim panen. Pengembaliannya dilakukan setelah panen, bisa berupa beras atau gabah. “Diharapkan dua tahun berjalan, lumbung itu akan bisa mandiri,” kata Septiani. Melihat jumlah desa di NTB yang mencapai 1046 desa, jumlah LPM yang sudah terbangun masih jauh dari ideal, “Mestinya setiap desa di NTB punya LPM masing-masing,” ujarnya.

Perihal lumbung Lombok yang memiliki kekhasan arsitektur, Septiani mengatakan pihaknya tengah mengupayakan agar program LPM untuk tahun 2018 mendatang dapat digunakan untuk membangun lumbung-

lumbung tradisional, bukan gudang beras seperti saat ini. “Jika rencana itu terwujud, tidak hanya kearifan pola ketahanan pangan tradisional yang akan kita hiduapkan, akan tetapi lumbung-lumbung khas itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi dunia pariwisata,” kata dia.

Konsep lumbung sebagai karya asitektur hari ini banyak digunakan sebagai konstruksi bangunan di gedung-gedung pemerintah, juga menjadi ikon pariwisata, hanya saja Agus Faturrahman memandang, ada banyak kekeliruan dalam penerapan konsep tersebut. “Sayangnya banyak bangunan berarsitektur lumbung yang dibangun asal-asalan sehingga bentuknya menjadi aneh, tidak proposional.” Agus menyayangkan sebagai konsep kearifan lokal ketahanan pangan, nilai-nilai yang dimiliki lumbung masih belum bisa ditransformasi dalam program-program pemerintah untuk pemberdayaan petani. Sementara ini lumbung hanya dijadikan lambang semata.

Sore itu, Hikmah meminta Lukman, anaknya menunjukkan persediaan padi dalam lumbungnya. Ada tujuh karung besar gabah, cukup untuk persediaan hingga panen mendatang. Seperti juga Khalid, petani desa Darek, Hikmah benar-benar menjalankan fungsi lumbung sebagai konsep ketahanan pangan. Dengan simpanan pangan yang dimilikinya, mereka telah bersiaga untuk kemungkinan terburuk, seperti gagal panen dan paceklik. Andai para petani lain di Lombok juga melakukan hal yang sama, tentu saja lumbuh tak akan menjadi sekedar lambang.



**L Darmawan**

Jurnalis yang berdomisili di Purwokerto, saat ini bekerja sebagai Kontributor [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id) wilayah Jateng Selatan.

# MITIGASI PACEKLIK PANGAN DIMILIKI OLEH KOMUNITAS ADAT BONOKELING, SEPERTI APA?

Oleh: **L. DARMAWAN**

Dimuat dalam Mongabay.co.id pada 24 Mei 2017

*Lumbung pangan tetap bertahan, karena tidak hanya merupakan sebuah budaya yang harus dilestarikan, tetapi manfaatnya secara nyata telah dirasakan.*

**H**ampir dapat dipastikan, ketika kemarau tiba maka petani di negeri ini bakal kesulitan untuk menanam padi. Apalagi, kalau ada El Nino yang kian memperpanjang musim tanpa turun hujan. Tak terkecuali apa yang dialami oleh Komunitas Adat Bonokeling yang berada di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng).

Dalam keseharian, warga adat Bonokeling menyatu dengan penduduk lainnya. Meski bercampur dengan khalayak ramai, namun mereka masih tetap mempertahankan adat budayanya secara kuat. Salah satunya adalah mitigasi kerawanan pangan. Tradisi yang hingga kini tetap dipertahankan adalah adanya lumbung pangan. Tradisi lumbung pangan yang sudah ditinggalkan oleh kebanyakan masyarakat, ternyata masih langgeng di tempat komunitas adat Bonokeling.



Situasi lingkungan rumah Bedogol Komunitas Adat Bonokeling di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah. Berbagai tradisi masyarakat adat itu masih tetap relevan sampai sekarang. Foto : L Darmawan

Juru bicara Komunitas Adat Bonokeling Sumitro mengungkapkan tatkala masyarakat umum tidak lagi mempedulikan adanya lumbung pangan, namun masyarakat adat Bonokeling tetap mempertahankan. “Ini adalah tradisi turun temurun dari nenek moyang kami yang tidak boleh hilang. Sebab, lumbung pangan telah nyata menolong warga ketika paceklik tiba. Apalagi, jika musim kemarau panjang datang, maka lumbung pangan jadi tumpuan,” ungkap Sumitro saat berbincang Jumat (19/05/2017) pekan lalu.

Hanya saja, lanjut Sumitro, jangan membayangkan bentuk bangunan lumbung pangan seperti dulu, dengan menggunakan rumah panggung berbahan kayu. Sebab, saat sekarang lumbung pangan berbarengan dengan Balai Rukun Tetangga (RT). Jadi, sebagian besar RT di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang memiliki lumbung pangan. “Lumbung

pangan ada, hanya tempat penyimpanannya saja yang berbeda,” ujarnya.

Dia mengungkapkan sampai sekarang masih ada 23 lumbung pangan yang tersebar di desa setempat. Lumbung pangan tetap bertahan, karena tidak hanya merupakan sebuah budaya yang harus dilestarikan, tetapi manfaatnya secara nyata telah dirasakan. “Jika musim kemarau tiba, apalagi panjang, maka warga Bonokeling akan menggantungkan pasokan pangan dari lumbung tersebut. Pangan yang disimpan berupa padi yang telah disetorkan oleh anggotanya pada saat panen tiba. Kalau rata-rata anggota sekitar 30-40 orang dan setorannya mulai 50 kg hingga satu kuintal, maka maksimal dalam satu gudang dapat menyimpan 4 ton gabah,” ungkapnya.



Sejumlah beras yang disiapkan untuk sebuah prosesi masyarakat adat Bonokeling yang tengah ditunggu Tetua adat. Foto : L Darmawan

Tentu saja, lanjut Sumitro, dalam meminjam harus dilakukan secara bijak. Pengurus lumbung akan memprioritaskan

yang paling membutuhkan. “Siapa yang paling membutuhkan, itu nanti yang bakal didahulukan. Sejak awal mula, telah disepakati jika peminjaman tersebut ada bunga yang harus ditanggung. Setiap satu kuintal, misalnya, maka bunganya sebanyak 20 kilogram (kg) atau 20%. Bunga yang terkumpul, nantinya juga dibagikan lagi kepada para anggotanya. Tradisi semacam itu sudah berjalan ratusan tahun dan hingga kini tetap jalan. Sebab, banyak yang merasakan manfaatnya. Tidak jadi soal, kalau banyak orang meninggalkan lumbung padi, namun kami tetap akan pertahankan,” tegas Sumitro.

Bagaimana jika padi benar-benar habis di lumbung? Sejauh ini, kata Sumitro, selama musim paceklik, stok di lumbungan pangan tetap masih ada. Namun, seandainya stok menipis atau habis, maka telah ada antisipasi lainnya. “Paceklik padi umumnya terjadi saat kemarau panjang datang. Sebagai petani, warga Bonokeling tidak hanya menggarap sawah, tetapi juga kebun. Hampir setiap ada lahan di kebun, tidak dianggurkan begitu saja, melainkan ditanami palawija. Salah satu jenisnya adalah singkong. Inilah komoditas yang bisa menyelamatkan kalau terjadi kemarau panjang,” ungkap Sumitro.

Singkong tersebut, katanya, diolah untuk dijadikan “oyek”. Caranya adalah dengan merendam singkong selama beberapa hari. Setelah empuk, singkong itu ditumbuk sampai tercipta butiran-butiran seperti beras. Butiran singkong tersebut kemudian diolah dengan cara dikukus. Begitu matang, dapat langsung dimakan. Namun, kalau ingin disimpan, maka langsung dikeringkan di bawah terik sinar matahari. Jika telah benar-benar kering, maka oyek tersebut dapat disimpan dan bertahan hingga beberapa bulan. “Pembuatan oyek tersebut kadang tidak hanya terpaku pada saat kemarau saja, sebab panen singkong setiap saat bisa. Dan sebagian singkong dibuat oyek. Apalagi, kalau menjual singkong mentah tidak

ada harganya, sangat murah,"katanya.



Salah seorang warga adat Bonokeling mengeringkan oyek, makanan berbahan baku singkong. Foto : L Darmawan

Menurutnya dengan menyimpan oyek, maka warga komunitas Bonokeling tidak terlalu khawatir seandainya terjadi kemarau panjang. Apalagi, dalam tradisi Bonokeling juga ada budaya *ngrakeh*. Apa itu? "*Ngrakeh* adalah disebut sebagai puasa. Ritual puasa *ngrakeh* dilaksanakan pada bulan Sura dalam kalender Jawa. Intinya, dalam puasa *ngrakeh* maka orang yang menjalankan tidak boleh makan berbahan nasi dari padi. Selama 40 hari, warga Bonokeling yang menjalankan puasa *ngrakeh* tidak boleh makan nasi. Mereka hanya dapat memakan selain nasi seperti oyek dan umbi-umbian," ujarnya.

Apakah masih banyak yang menjalankan ritual *ngrakeh*? Sumitro mengatakan dalam *lelaku* atau menjalankan ritual puasa *ngrakeh* tersebut tidak boleh diomong-omongkan. "Misalnya saya menjalani, maka tetangga saya tidak perlu tahu. Jadi *lelaku* itu adalah masalah pribadi, tidak boleh

diceritakan sama orang lain,” kata dia.

Jadi, ketika pemerintah memiliki program diversifikasi pangan atau sehari tanpa nasi, maka komunitas adat Bonokeling sudah menjalankan bahkan lestari sampai sekarang. “Memang kalau dilihat, pemerintah menggalakkan adanya lumbung pangan atau warga diminta untuk tidak hanya makan nasi saja, namun bagi masyarakat adat kami, semua hal itu sudah kami laksanakan bahkan akan terus dilanjutkan,” ungkap Sumitro.

Warga adat Boneling asal Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kaswadi, 55, mengatakan bahwa *ngrakeh* memang menjadi salah satu ritual yang dijalani oleh masyarakat Bonokeling. “Dalam setahunnya, banyak sekali ritual yang dijalani. Salah satunya adalah *ngrakeh* pada saat bulan Sura. Biasanya, untuk ritual *ngrakeh*, warga yang menjalani tidak mengonsumsi makanan dari padi atau nasi. *Ngrakeh* ini adalah “lelaku” yang dilakukan oleh masing-masing pribadi,” ujarnya.



Kebersamaan warga adat Bonokeling, salah satunya ditunjukkan dengan gotong-royong saat menata daging kambing dan sapi hasil pematongan. Foto : L Darmawan

Pendamping Lokal Desa (PLD) Pekuncen Eko Yulianto mengatakan bahwa tradisi dan budaya di masyarakat adat Bonokeling benar-benar masih sangat dijaga. “Mereka memiliki kearifan lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi kekinian. Salah satunya adalah bagaimana mereka mengantisipasi saat paceklik ketika musim kemarau datang. Warga Bonokeling telah memiliki cara, salah satunya adalah mempertahankan lumbung pangan. Sebab, saat musim paceklik, padi di dalam lumbung pangan menjadi stok untuk mengatasi kesulitan pangan. Hal itu masih dipertahankan sampai sekarang bersama dengan tradisi-tradisi lainnya,” tandasnya.

Tradisi yang dimiliki oleh komunitas adat Bonokeling barangkali dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, namun kenyataannya budaya mereka masih relevan dengan zaman kekinian. Bahkan, tradisi mereka dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya.



**Febrianti**

Jurnalis yang berdomisili di Padang, Sumatera Barat. Ia kerap dipanggil Yanti. Sudah berprofesi sebagai jurnalis sejak tahun 2000, saat ini aktif sebagai Ketua tim redaksi di [JurnalisTravel.com](http://JurnalisTravel.com). Sudah mendapatkan beberapa penghargaan kepenulisan jurnalistik seperti "Nominasi karya penulisan terbaik di bidang Feature, Mochtar Lubis Award 2009"; Juara 3 Feature Pendidikan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan tahun 2016; dan Juara 1 lomba tulisan BNPB tahun 2016.

# SAGU YANG MULAI TERGUSUR DI MENTAWAI

Oleh: **FEBRIANTI**

Dimuat dalam [JurnalTravel.com](http://JurnalTravel.com) pada 30 Mei 2017

*“Sekarang tidak banyak lagi orang yang mengolah sagu, jadi kami bisa menjualnya, karena ternyata masih banyak yang suka makan sagu, walau mereka juga makan nasi.”*

**D**i tengah hutan di pinggir jalan Sikabalu, Siberut Utara, Kepulauan Mentawai, seorang lelaki muda terlihat seperti sedang menari. Kakinya menghentak berirama seperti tarian Sikerei, dukun Mentawai di atas lantai uma, rumah tradisional Mentawai. Tapi itu bukan lantai uma, dia sedang menari di atas tapisan kayu, menginjak-injak serpihan putih sagu yang menumpuk tebal di atasnya.

Sesekali ia menimba air dari sungai kecil di bawahnya dan menyirami sagu-sagu itu, lalu menginjak-injaknya kembali. Di bawah tapisan kayu cairan putih sagu yang ditampung dialirkan ke atas sampan kecil untuk tempat cairan putih itu diendapkan yang akan memisahkan air dan pati sagu.

Pria itu Ardi, 20 tahun, warga Sikabalu. Sudah tiga hari mengolah sebatang sagu bersama sepupunya Andi, 17 tahun. Andi berada tak jauh di dekatnya, sedang memarut sagu dengan parutan kayu yang besar. Sebatang pohon sagu sepanjang 15 meter yang sudah dipotong-potong itu bisa menghasilkan 170 karung tepung sagu. Satu karung seberat 20

kilogram. Tepung ini selain mereka gunakan untuk makanan pokok juga dijual ke warga lain. Satu karung seharga Rp70 ribu.

Hutan di sekeliling mereka sebagian besar ditumbuhi pohon-pohon sagu yang menjulang tinggi dan subur di atas rawa-rawa. Mereka menebang sebatang sagu tak jauh dari sana dan mengolahnya di sungai kecil yang mengalir di hutan itu.

“Sekarang tidak banyak lagi orang yang mengolah sagu, jadi kami bisa menjualnya, karena ternyata masih banyak yang suka makan sagu, walau mereka juga makan nasi, harga beras jadi lebih mahal, sekilo Rp13 ribu,” kata Ardi.

Sagu sebenarnya sejak dulu menjadi sumber utama hidrat arang di Mentawai. Pohon sagu banyak tumbuh subur di rawa-rawa. Tanpa ditanam, tanaman ini bisa berbiak sendiri melalui tunasnya yang akan memenuhi rawa dan tak ada habisnya. Tetapi karena pentingnya sagu bagi orang Mentawai, mereka mewajibkan setiap keluarga baru menanam beberapa batang tunas sagu di tempat yang sudah banyak dipanen untuk jaminan hidup bagi anaknya kelak.

Sagu di Siberut juga tumbuh besar dan tinggi. Bisa mencapai 12 meter hanya dalam 8 tahun. Zat-zat makanan yang terbawa aliran tanah yang terus-menerus turun dari bukit-bukit berhutan di sekitarnya memenuhi rawa-rawa dan menjadikannya sumber kesuburan yang tak habis.

Sagu tumbuhan yang paling banyak memberikan hasil pada manusia dengan kerja yang sedikit. Dari sebatang sagu sepanjang 15 meter bisa menyediakan makanan selama tiga bulan untuk satu keluarga.

Tepung sagu juga sangat banyak mengandung hidrat arang, 50% hidrat arang dan menyediakan 241 kalori per 100

gram. Meskipun sagu berisi sedikit protein hanya 1,5 persen, tetapi secara tak langsung sagu juga menyediakan protein.

Dari sebatang sagu yang ditebang dan dipotong-potong, satu potongan yang paling muda digunakan untuk membuat batra atau ulat sagu. Batang sagu dibelah, satu sisi batang sagu dibiarkan terbuka dengan memberi ganjalan sebilah kayu agar tawon besar (*Rynchoporus ferrugineus*) bertelur di celah batang yang mengandung sagu yang perlahan-lahan meragi.

Selama 7-12 minggu di dalam batang sagu itu sudah berkembang ulat-ulat sagu berwarna putih sebesar jari sepanjang 3-4 cm. Ini sumber protein yang penting dan amat disukai. Di pasar Sikabalu, semangkuk kecil ulat sagu dijual seharga Rp10 ribu rupiah. Ulat sagu ini diolah, dimasak, dibakar atau dikeringkan. Sagu juga dijadikan makanan ternak, untuk makanan babi, ayam, dan bebek.

Bagian lain dari pohon sagu masih berguna. Daunnya untuk atap rumah, kulit pohonnya yang keras bisa dibentang untuk jalan setapak di halaman rumah, untuk bahan membuat keranjang atau menjadi kayu bakar.

Untuk makanan pokok, tepung sagu diolah secara sederhana. Tepung sagu diolah menjadi makanan seperti *obuk* atau *kapurut*. Obuk adalah sagu yang dimasak dalam bambu, sedangkan kapurut sagu yang dimasak dalam daun sagu.

Untuk membuat obuk, gumpalan tepung sagu yang basah diparut dari parutan yang dibuat dari bilah-bilah bambu sehingga tepungnya menjadi halus. Kemudian tepung ini dimasukkan ke dalam bumbung bambu tipis ukuran kecil dengan diameter 3 sentimeter.

Bambu berisi sagu disusun di atas tungku dan dibakar di atas api sekitar 10 menit. Setelah matang, bambu dibelah dan sagu di dalamnya siap dihidangkan bersama lauk yang

lainnya. Sagu ini biasanya dihidangkan dengan makanan berkuah seperti sup ayam atau sup ikan.

Tapi kini di Mentawai sagu sudah mulai digeser beras, karena pemerintah menggalakkan penanaman padi ladang sejak lima tahun terakhir, walaupun hasilnya tidak begitu subur.

Lahan sagu juga mulai terdesak oleh pembukaan ladang dan sawah baru. Tahun lalu di Saibi, Siberut Tengah, ladang sagu malah terancam pembukaan Hutan Tanaman Industri seluas 20 ribu hektare, tapi karena diprotes masyarakat rencana ini ditunda.

“HTI itu masuk ke wilayah yang banyak tanaman sagu yang menjadi makanan pokok orang Mentawai, padahal sagu itu lumbung ketahanan pangan orang Mentawai dan tidak pernah gagal panen seperti padi, ladang sagu juga untuk mas kawin dan sangat penting dalam budaya di Mentawai,” kata Indra Gunawan Sanenek, warga Saibi memberi alasan penolakan.

Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Mentawai Rapot Simanjuntak mengatakan, belum ada perlindungan untuk sagu sebagai makanan pokok dari pemerintah. Sagu juga mulai ditinggalkan karena kecenderungan masyarakat adat pun sepertinya mengikuti program pemerintah untuk bertanam padi.

Ia mengatakan, di beberapa tempat di Siberut, ladang sagu sudah mulai terdesak dengan pembukaan lahan untuk sawah dan pembangunan perkantoran pemerintah dan swasta.

Di tiga pulau lainnya, seperti Sipora dan Pagai Utara dan Pagai Selatan, sagu bukan lagi menjadi makanan pokok, tetapi hanya dimakan sesekali saja. Karena makanan warga tiga pulau ini dulunya adalah keladi dan pisang, walaupun sagu

juga digunakan.

“Kini yang makan sagu sebagai makanan pokok di Mentawai saya perkiraan tinggal 40 persen saja, karena sudah mulai berganti ke beras,” kata Rapot.

Ketergantungan ke beras menjadi tinggi karena pemerintah ikut mendorongnya dengan membuat program menanam padi dengan bantuan dana APBD Mentawai dan melalui bantuan beras miskin.

Untuk melindungi sagu sebagai makanan pokok, AMAN Mentawai akan melakukan penggalian aturan adat yang berkaitan dengan pengelolaan rawa atau *onaja* diperlukan agar aktivitas di daerah rawa yang umumnya dilakukan oleh kaum perempuan dapat terlindungi kembali dengan penerapan aturan adat yang dulunya sudah ada yang dinamakan Onaja.

“Onaja sesuai aturan adat bisa digunakan oleh siapapun di komunitas yang mau mengelolanya dan dikhususkan untuk tanaman pangan lokal seperti keladi dan sagu,” kata Rapot.

Di kawasan rawa, lokasi tanaman sagu juga tempat aktivitas menangkap ikan yang dulunya telah ada seperti babak (kubangan alami) dan siungguk (kubangan yang sengaja dibuat oleh pemilik tanah).

Siungguk dan babak adalah kubangan yang diperuntukkan untuk tempat ikan di onaja. Ada saatnya dilakukan panen ikan dengan mengajak beberapa kaum ibu lainnya untuk bersama melakukan panen ikan. Umumnya dilakukan saat kemarau.

“Penggalian aturan adat dan aktivitas yang menunjukkan kebersamaan di daerah rawa, kita rencanakan dengan lembaga adat bekerja sama dengan pemerintah desa dibuat dalam bentuk peraturan desa yang didasari aturan adat sehingga aktivitas menanam sagu dan juga keladi tetap terlindungi, hak kelola kaum perempuan di rawa kami jadikan sebagai titik

masuk dalam intervensi menjaga makanan pokok sagu dan keladi,” katanya.

Saat ini di komunitas masyarakat adat di Sipora masih tahapan revitalisasi lembaga adat dan menggali aturan-aturan adat terkait pengelolaan sumber daya alam.

“Untuk RPJMD Mentawai 2017-2022, kami sedang menyiapkan usulan program kelestarian lingkungan berbasis kearifan dan pengetahuan lokal, selain itu kami juga mengusulkan program perlindungan tanaman dan hewan endemik di wilayah adat,” katanya.





**M Ramond Eka Putra Usman**

Jurnalis kelahiran Muara Sabak tahun 1983 ini berdomisili di Jambi. Sudah menjadi jurnalis sejak 2006, dan kini menjadi kontributor [viva.co.id](http://viva.co.id) wilayah Jambi. Ia juga aktif menjadi pengurus Aji Jambi.

# BERBURU DAN MERAMU PANGAN UNTUK BERTAHAN

Oleh: **M RAMOND EKA PUTRA USMAN**

Dimuat dalam [independen.id](http://independen.id) pada 15 Mei 2017

*Orang Rimba yang sudah tidak tinggal di dekat kawasan taman nasional jauh lebih sulit hidupnya dalam memenuhi kebutuhan pangan. Karena, mereka tinggal di kebun-kebun sawit atau karet yang tidak terdapat makanan yang biasanya lebih mudah didapatkan di dalam hutan.*

**Jambi** -- Hari sudah petang, Tumenggung Ngilo harus meninggalkan kebun karetnya sebelum gelap. Mengendarai sepeda motor, Ngilo menyusur jalan setapak ditumbuhi belukar menuju kediaman bersama puluhan Orang Rimba di Pemenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. “Kalau sedang tidak berburu, saya *nyadap* karet di kebun,” kata Ngilo kepada koresponden *Independen* ketika ditemui di kediamannya, Jumat, (12/4).

Berburu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Orang Rimba untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Babi sasaran utama saat berburu. Kalau nasib baik, kancil dan rusa jadi berkah hasil buruan yang bisa mereka santap. “Sekarang ini sudah susah untuk dapat kancil dan rusa. Paling sering itu dapat babi,” jelasnya.

Butuh waktu dua hingga tiga malam di dalam hutan untuk Ngilo bersama kelompoknya berburu. Mengandalkan *kecepek*, senjata yang mereka rakit sendiri, buruan jarang meleset dari bidikan. Kemampuan berburu dan merakit senjata ini sudah didapatkan Ngilo dan Orang Rimba secara turun temurun. “Kalau tidak berburu, tidak makan,” ungkapnya.

Saat hasil buruan babi dapat lebih dari tiga ekor, Ngilo menjualnya. Uang hasil penjualan binatang itu mereka gunakan untuk membeli beras. Kalau tidak dapat buruan sama sekali, mereka pun mencari ubi untuk dimakan.

Diakui Ngilo, kebutuhan pangan kelompoknya, saat ini, semakin sulit. Karena tidak bisa mengandalkan hasil buruan saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada kalanya mereka harus mengumpulkan berondolan sawit di kebun warga untuk dijual. Kadang memungut buah pinang yang jatuh berserakan di kebun warga.

Hasil memungut berondolan sawit dan pinang ini mereka jual per kilo Rp7 ribu. Rata-rata mereka bisa menjual sampai 10 kilogram. Sedangkan untuk kebun karet, Orang Rimba di bawah kepemimpinannya harus bergantian mengolahnya. Karena, mereka harus berbagi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Pernah beras satu kilo harus dibagi-bagi. Kami utamakan beri makan anak kecil,” katanya.

Kondisi seperti ini harus mereka lalui setiap hari. Tak heran, penyakit mudah menyerang karena asupan makanan yang kurang. Diagnosisnya petugas penyakitnya maag. “Mungkin karena jarang makan,” ungkapnya.

Ngilo berharap pemerintah peka terhadap kondisi mereka. Ia tidak melupakan bantuan tempat tinggal kepada beberapa kelompok Orang Rimba. Namun, menurutnya, kebutuhan

lahan untuk berkebun jauh lebih penting. Karena kebanyakan bantuan rumah dari pemerintah juga tidak digunakan kebanyakan Orang Rimba di Jambi.

Tidak jauh berbeda dengan kelompok Tumenggung Ngilo, kelompok Orang Rimba di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi juga mengalami hal serupa. Mereka masih harus keluar masuk hutan untuk mencari makanan dan berjalan hingga delapan kilo meter menuju kebun mengambil makanan.

“Tempat tinggal yang disediakan pemerintah jauh dari lahan pangan,” kata Njalo, Orang Rimba di bawah kepemimpinan Tumenggung Grip.

Persoalan lainnya, di dalam Taman Nasional Bukit Duabelas sudah semakin sempit untuk kehidupan Orang Rimba Jambi. Akibatnya, hewan buruan juga semakin sulit didapatkan. Mencari jernang, getah karet dan damar menjadi pilihan yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan uang membeli kebutuhan makan sehari-hari.

Nasib Njalo pun tak jauh beda dengan Ngilo. Jika tak mendapat hewan buruan, getah karet belum bisa dijual, damar dan jernang juga tidak ada, mereka terpaksa makan gadung, umbi-umbian yang mengandung racun, banyak tumbuh di hutan.

Meski beracun, diakuinya, Orang Rimba sangat mahir mengolah tanaman beracun ini. Dengan cara, gadung dimasukan ke dalam karung, kemudian direndam ke dalam sungai mengalir beberapa hari. Selanjutnya, gadung dijemur dan diiris untuk direbus. “Kadang juga makan benor dan umbut (keduanya umbi-umbian di dalam hutan),” katanya.

Untuk berburu, diakui Njalo, mereka bisa melakukan dengan dua cara. Pertama, menggunakan *Kecepek* (menembak),

kedua dengan memasang jerat. “Jerat kami buat dari kulit kayu. Dipasang di lintasan hewan buruan. Dibiarkan dua hari, biasanya ada babi yang terjerat,” jelasnya.

Diakui Njalo, Orang Rimba tidak memakan binatang ternak. Hanya memakan binatang liar di dalam hutan. Ini sudah tertuang dalam adat Orang Rimba. “Kami tidak makan hewan ternak seperti ayam, kambing, sapi, dan bebek. Karena bagi kami, ayam itu *kuwau* di dalam hutan, kambing itu kijang, dan sapi itu rusa,” jelas Njalo.

Dengan adanya aturan adat ini, menjadikan Orang Rimba dengan orang desa tidak saling berebutan buruan binatang. Orang Rimba tidak akan mencari binatang ternak, dan orang desa tidak mencari binatang di dalam hutan. “Aturan ini juga menjadi perjanjian Orang Rimba dengan orang dusun,” katanya.

Sementara itu, Robert Aritonang, Manejer Program Konservasi dan Pemberdayaan KKI Warsi, menjelaskan bagaimana pola Orang Rimba Jambi dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sejak 1997, dirinya melakukan penelitian terhadap kehidupan Orang Rimba, sudah terjadi berbagai perubahan pola pemenuhan kebutuhan pangan Orang Rimba.

Dikatakannya, kebiasaan Orang Rimba memenuhi kebutuhan pangan yaitu berburu, meramu dan bercocok tanam. Ketiga cara ini masih ada yang melakukan dan ada yang tidak. Karena, tidak semua Orang Rimba hidup di dalam Taman Nasional Bukit Duabelas. “Orang Rimba yang masih di dalam (hutan), masih berburu, meramu, dan bercocok tanam. Sedangkan yang tinggal di luar taman nasional sudah ada yang berkebun karet,” jelasnya.

Meski sudah ada yang berkebun karet, berbeda dengan petani karet lainnya. Selain kebun karet yang tidak luas, hasil

karetnya dijual hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Seperti membeli gula, kopi, rokok dan ikan," kata Robert.

Memakangadung, benor dan umbut, itu biasanya dilakukan Orang Rimba ketika memasuki masa *remayo* (paceklik). "Biasanya *remayo* itu terjadi ketika mereka sedang *belangun* (mengembara meninggalkan suatu tempat karena ada kematian anggota kelompok)," ujarnya.

Selama perjalanan Belangun, Orang Rimba memakan gadung, benor dan umbut. "Itu akan kelihatan di sepanjang perjalanan mereka. Ada bekas galian tanah mencari gadung, benor dan umbut," ungkapnya.

Memakan umbi-umbian hutan ini, kata Robert, merupakan cara Orang Rimba memenuhi kebutuhan karbohidrat. Sedangkan untuk protein, babi hasil buruan merupakan binatang paling sering dikonsumsi. Ada juga hewan sejenis kura-kura yang dikenal Orang Rimba dengan nama si bodo. "Kalau dapat sarang si bodo itu, mereka bisa mendapatkan sampai puluhan ekor," katanya.

Sedangkan binatang yang paling gampang didapatkan untuk dikonsumsi Orang Rimba yaitu katak dan *kelembuai* (keong). "Pola memenuhi kebutuhan pangan ini masih dilakukan Orang Rimba yang tinggal di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) atau di sekitarnya (kebun perusahaan dan warga - *red*)," jelas Robert.

Namun, kata Robert, Orang Rimba yang sudah tidak tinggal di dekat kawasan taman nasional jauh lebih sulit hidupnya dalam memenuhi kebutuhan pangan. Karena, mereka tinggal di kebun-kebun sawit atau karet yang tidak terdapat makanan yang biasanya lebih mudah didapatkan di dalam hutan.

"Seperti di Pamenang Bangko, tidak mungkin Orang

Rimba di sana menemukan hutan. Hanya mengandalkan berburu babi. Kalau saat *remayo*, mereka mengambil buah sawit yang jatuh untuk dijual. Bahkan, ada yang merebus buah sawit untuk dimakan,” ungkapnya.

Meski persoalan pangan Orang Rimba belum menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jambi. Ini terbukti tidak ada program pertanian dan ketahanan pangan mengarah khusus kepada Orang Rimba Jambi. “Kalau khusus untuk Orang Rimba Jambi dari provinsi tidak ada. Tapi kalau unuk program ketahanan pangan juga dilakukan di tiap kabupaten. Mungkin ada programnya di daerah,” kata Badrun Tamam, Plt Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Senin 15 Mei 2017.

Dikatakannya, program Pemerintah Provinsi Jambi mengarah kepada bantuan ke tiap desa. “Program untuk desa ini juga bagi Orang Rimba yang ada di desa-desa di Provinsi Jambi,” ujarnya.

Salah satu masalah program pertanian untuk Orang Rimba Jambi kata Rudi Syaf, Manejer Program dan Komunikasi KKI Warsi, yaitu ketersediaan lahan yang tidak memadai di sekitar Orang Rimba Jambi. “Salah satu solusi lahan pertanian untuk pangan Orang Rimba Jambi, yaitu areal di bawah pemegang izin hutan produksi mengalokasikan untuk Orang Rimba berdasarkan teritorial masing-masing,” katanya.

## **KEKURANGAN PANGAN BERUJUNG KEMATIAN**

Persoalan Pangan yang berujung kematian Orang Rimba, sudah terjadi sejak tahun 1997. Kematian beruntun Orang Rimba terjadi sejak tahun 1997. Terakhir di tahun 2015, puluhan Orang Rimba mati beruntun dalam tiga bulan.

Memang bukan karena tidak mendapatkan makanan,

mereka langsung meninggal. Tapi karena asupan makanan yang kurang, mengakibatkan Orang Rimba gampang terserang penyakit. “Daya tahan tubuh mereka lemah, penyakit gampang menyerang,” kata Robert.



*Land clearing di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi. Foto dokumentasi Warsi.*

Ditambah lagi, tidak adanya fasilitas kesehatan terdekat. Anak-anak tidak pernah diimunisasi dan tingkat gizi rendah. Belum lagi *land clearing* alias menggunduli lahan, hanya tersisa hamparan tanah, yang dilakukan perusahaan perkebunan di sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas adalah wilayah Orang Rimba hidup dan mencari makan.

*Land clearing* rata-rata mencapai 200 hektar per bulan yang dilakukan tiap perusahaan. “Jangankan manusia, binatang saja tidak bisa hidup di areal *land clearing*,” jelas Robert.

Kondisi seperti ini kata Robert semakin memperparah kondisi Orang Rimba ketika sedang *belangun*. Sulit menemukan

makanan. Sehingga kekurangan asupan makanan/gizi dan daya tahan tubuh menjadi lemah dan gampang terserang penyakit.

Dari data KKI Warsi, sedikitnya 10 perusahaan hutan tanaman industri (HTI) berada di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas. Total keseluruhan areal HTI 318.648 hektar.

Menurut Robert, untuk jangka panjang, jaminan perlindungan hak Orang Rimba atas kawasan hidup termasuk lahan dan sumber daya di dalamnya harus dilakukan negara. Perlindungan ini terutama yang berada atau tumpang tindih izin konsesi HTI dan HGU perkebunan.

Bagi perusahaan yang sudah terlanjur melakukan okupasi terhadap kawasan hidup Orang Rimba, Robert mengatakan pemerintah harus turun tangan memastikan hak Orang Rimba mendapat kompensasi dari perusahaan. Kompensasi yang dimaksud tak lain jaminan kehidupan jangka panjang dari perusahaan. Berupa lahan atau kebun, atau bagi hasil keuntungan perusahaan.

Karena hutang perusahaan kepada Orang Rimba berbeda maknanya dengan tanggung jawab sosial. Robert mengatakan upaya mendapatkan kembali hak Orang Rimba di tanah leluhur yang sudah dikuasai perusahaan perlu didorong berbagai pihak seperti LSM, Komnas HAM, media dan akademisi. "Perlu tindakan darurat untuk Orang Rimba mengalami malnutrisi dan sakit," katanya.

Tidak hanya menyediakan makanan, penambahan gizi, pemberian imunisasi, terobosan administrasi untuk layanan kesehatan juga perlu segera dilakukan. Robert mencontohkan puskesmas *mobile* untuk Orang Rimba dengan sumber daya penduduknya, dapat menjadi salah satu tindakan segera

untuk menjangkau layanan ke mereka.

Akhir 2015, Lembaga Eijkman mengeluarkan data hasil penelitian kerentanan terhadap penyakit pada Orang Rimba Jambi. Penelitian dilakukan terhadap penyakit seperti malaria dan hepatitis. 583 Orang Rimba diperiksa dalam penelitian ini.

Hasilnya, prevalensi hepatitis B antigen Orang Rimba menunjukkan hiperendemisitas. Pada populasi dewasa 33,9 persen (hiperendemik). Prevalensi ini tinggi di semua kelompok usia 17-55 tahun (usia produktif). Tertinggi pada rentang usia 36-40 tahun, dan menurun pada usia > 55 tahun. Tidak jauh berbeda dengan penderita malaria.

Mengatasi persoalan kesehatan Orang Rimba Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mengatasinya dengan program pelayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil. Kegiatan ini dilakukan di lima lokasi berbeda dalam satu tahun.

Fitri Balgis, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mengatakan petugas telah melakukan pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada Orang Rimba. Termasuk sosialisasi bagaimana pola hidup bersih dan sehat. "Seperti sosialisasi kesehatan terhadap ibu dan anak," katanya, Senin (15/5).

Ia mengatakan setelah beberapa kali pertemuan dengan Orang Rimba Jambi, perilaku hidup tidak sehat masih sering ditemukan. Karena, Orang Rimba Jambi hidup berpindah-pindah dan tinggal di pondok-pondok. "Penyakit kulit, flu dan kutu rambut sering kami temui," katanya.

Kematian beruntun yang menimpa Orang Rimba Jambi menurutnya hubungan dengan ketersediaan pangan. Akibatnya persoalan gizi kurang sangat dominan. "Daya tahan tubuh kurang dan mudah terserang penyakit," katanya menjelaskan.



**Eka Handriana**

Saat ini menjadi jurnalis lepas. Karyanya dipublikasikan di [metrosemarang.com](http://metrosemarang.com), [Rapppler Indonesia](http://Rapppler Indonesia) dan [Pana Journal](http://Pana Journal). Berdomisili di Semarang, Jawa Tengah.

# PARA PETANI YANG TERBUANG DARI TANAH MOYANG

Oleh: **EKA HANDRIANA**

Dimuat di Rappler.com pada 10 Juni 2016

*“Setiap ada perusahaan yang masuk, kami digeser ke lahan yang di pojok-pojok yang tidak disewakan. Nanti kalau perusahaan penyewa sudah pergi, kami digeser ke tengah lagi sekaligus untuk mengolah lahan biar subur.”*

SEMARANG, Indonesia — Adzan Ashar berkumandang. Beberapa perempuan bercapung berjalan urut di pematang, meninggalkan sawah yang seharian mereka geluti. Mereka melintasi jalan di bawah gapura hijau bertuliskan “Selamat Datang – Desa Surokonto Wetan”.

Jalan itu merupakan jalan masuk ke Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pegeruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dinamai Jalan Kyai Joko Suro. Bukan nama yang asal diambil ataupun asal disebut. Bagi warga Surokonto Wetan, Kyai Joko Suro adalah pahlawan, leluhur perintis kehidupan pertanian di desa tersebut.

“Kyai Joko Suro bersama Kyai Salim adalah dua tokoh yang dulu *mbabat alas* wilayah ini. Membukanya untuk area pertanian, membuat sengkedan sekaligus irigasi. Itu sebelum Belanda datang,” kata To Wikromo (94 tahun), salah seorang

warga asli Surokonto Wetan.

Menurut cerita turun temurun di kalangan warga, sebelum Belanda menduduki Kendal, penduduk asli Surokonto Wetan sudah melakukan kegiatan pertanian. Menanam jagung, ketela, dan apa saja untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Kyai Joko Suro dan Kyai Salim meninggalkan sistem irigasi kuno yang mereka buat untuk mengairi sawah di Surokonto Wetan dan Surokonto Kulon. Irigasi yang airnya berasal dari Sungai Damar, terletak di barat daya Kendal, dialirkan melingkari perbukitan dan membelah hutan. Aliran menuju ladang pertanian di wilayah Pageruyung, termasuk Surokonto Wetan dan Surokonto Kulon, yang letaknya di bagian selatan Kendal.

Kepada generasi yang lebih muda, Wikromo menceritakan sistem irigasi karya Kyai Joko Suro dan Kyai Salim dikonversi menjadi irigasi teknis oleh Belanda sekitar 1930-an. Aliran yang memutar di kaki-kaki bukit diubah menjadi aliran yang menembus bukit.

Upaya pembukaan lahan, pembuatan sengkedan di tebing-tebing perbukitan hingga, pencetusan sistem irigasi yang dilakukan Kyai Joko Suro dan Kyai Salim itu menjadi pengetahuan warga. Pengetahuan yang terus diwariskan pada generasi baru, sebagaimana penggarapan lahan yang terus berlangsung turun-temurun, sehingga warga meyakini bahwa tanah di wilayah tersebut adalah warisan moyang mereka.

Kendati demikian, tidak ada catatan di atas kertas mengenai hak warga pada kepemilikan lahan yang digarap tersebut.

## **KEPEMILIKAN LAHAN**

Dari gapura tanda memasuki Desa Surokonto Wetan, jika

menoleh ke arah kiri akan tampak lereng perbukitan yang dipenuhi tanaman jagung yang sudah berbunga. Di pinggir area tanaman jagung, berjajar tanaman singkong. Itulah lahan yang digarap oleh sekurangnya 450 petani Sukoronto Wetan, tanpa dokumen kepemilikan.

Di situ pula letak makam Kyai Joko Suro yang selalu dibersihkan saat peringatan haul atau hari kematiannya setiap Bulan Syawal. Haul Kyai Salim diperingati setiap bulan Zulhijah.

Sejak 1972, petani Surokonto Wetan menggarap lahan tersebut secara bagi hasil dengan PT Sumur Pitu Wringinsari. Dua per tiga bagian hasil untuk petani penggarap dan sepertiga hasil untuk PT Sumur Pitu Wringinsari.

PT Sumur Pitu Wringinsari adalah pemegang Hak Guna Usaha (HGU) berdasar Surat Keputusan Direktorat Jenderal Agraria Nomor SK.16/HGU/DA/72 tertanggal 13 Oktober 1972, berlaku hingga 1997. Lahan Surokonto Wetan seluas 127,821 hektare yang sebagian digarap petani setempat termasuk di dalamnya.

Pada 1998, PT Sumur Pitu Wringinsari mengajukan perpanjangan HGU kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jawa Tengah. Pengajuan disetujui melalui Surat Keputusan Kepala BPN Jawa Tengah, Nomor SK.540.2/005/7/504/33/99 yang diterbitkan pada 20 Februari 1999.

HGU berlaku 25 tahun hingga 2022, termasuk di dalamnya lahan Surokonto Wetan seluas 127,821 hektare.

Sementara hak kepemilikan lahan ada pada negara. Hal itu berdasar Akta Jual Beli Nomor 45 tertanggal 23 Desember 1952 di hadapan notaris RM Soeprapto. Perkebunan di Kabupaten Kendal yang pada masa penjajahan dikuasai oleh perusahaan

perkebunan swasta NV Rotterdamsche Cultuur Maatschapij dan NV Cultuur Maatschapij Satrian, saat itu dibeli Pemerintah Republik Indonesia melalui Biro Rekonstruksi Nasional.

PT Sumur Pitu Wringinsari sendiri merupakan perusahaan perkebunan, angkutan, dan perindustrian yang berada di bawah naungan Yayasan Rumpun Diponegoro milik Kodam IV Diponegoro. Pada dokumen perpanjangan HGU yang dikeluarkan BPN Jawa Tengah, diketahui alamat PT Sumur Pitu Wringinsari berada di Jalan Kepodang Nomor 9 Semarang.

Berdasar keterangan yang dihimpun dari petani penggarap lahan HGU PT Sumur Pitu Wringinsari, bagi hasil masih terus berlangsung hingga 2013. Sayangnya, petani penggarap tidak menandatangani perjanjian bagi hasil.

Kendati begitu, mereka memiliki kwitansi sebagai bukti penyerahan hasil kepada PT Sumur Pitu Wringinsari melalui pengurusnya. Petani penggarap menyebutnya mandor.

Ketika Rappler mengunjungi kantor PT Sumur Pitu Wringinsari di Jalan Kepodang Nomor 9, Semarang, kantor tersebut tampak kosong dan tidak ada aktivitas. Rappler lalu menyusuri Jalan Kepodang Nomor 1, tempat sebuah aset milik Puskopad A Kodam IV Diponegoro. Dari tempat itu Rappler mendapat informasi bahwa Kantor Yayasan Rumpun Diponegoro yang menaungi PT Sumur Pitu Wringinsari pindah ke Jalan Pemuda 145.

Namun ketika dikunjungi di sana, mereka menolak untuk memberikan konfirmasi.

## **TERBUANG**

Selama puluhan tahun, besaran lahan yang dikelola petani penggarap lahan HGU PT Sumur Pitu tersebut tidak tetap. Sebab selain petani penggarap, juga ada perusahaan

perkebunan lain yang menyewa lalu menggarap lahan tersebut. Di antaranya ada perusahaan yang menyewa dan menanam tebu, serta murbei untuk budidaya ulat sutera.

“Setiap ada perusahaan yang masuk, kami digeser ke lahan yang di pojok-pojok yang tidak disewakan. Nanti kalau perusahaan penyewa sudah pergi, kami digeser ke tengah lagi sekaligus untuk mengolah lahan biar subur. Tetap dengan bagi hasil,” kata salah satu penggarap, Nur Azis (44).

Pada 2013, Menteri Kehutanan mengeluarkan surat keputusan penunjukan kawasan hutan produksi tetap untuk lahan yang terletak di Desa Surokonto Wetan seluas 125,53 hektar.

Surat bernomor SK.643/MENHUT-II/2013 terbit tanggal 25 September 2013. Penunjukan kawasan hutan di Surokonto Wetan itu dilakukan untuk memenuhi penggantian lahan kawasan hutan di Rembang yang digunakan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk pembangunan pabrik semen.

“Kami tidak tahu tentang SK (surat keputusan penunjukan kawasan hutan) itu,” aku Nur Azis. Menurutnya, tidak ada sosialisasi tentang SK penunjukan kawasan hutan. Penggarapan lahan masih terus dilakukan oleh petani setempat.

Pengetahuan ini terus diwariskan pada generasi baru, sebagaimana penggarapan lahan yang terus berlangsung turun-temurun, sehingga warga meyakini bahwa tanah di wilayah tersebut adalah warisan moyang mereka.

Surat keputusan penunjukan kawasan hutan disusul dengan surat keputusan penetapan kawasan hutan produksi pada bagian hutan Kalibodri untuk tanah seluas 127,821 hektare di Surokonto Wetan. Surat Keputusan bernomor SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tertanggal 17 April 2014 itupun

tidak disosialisasikan, warga tidak tahu.

Pada penghujung 2014, menurut Nur Azis, ada kajian sosial yang memaparkan bahwa lahan tersebut akan dijadikan hutan produksi. Petani Surkonto Wetan keberatan, lantaran mereka menggantungkan hidup dengan menggarap lahan tersebut.

“Pada saat itu kami tidak setuju. Karena kalau jadi hutan produksi, kami tidak mendapat tempat lagi untuk bertani. Katakanlah kalau ditanami karet, ya kami bisa menanam jagung atau lainnya di sela-sela karet. Tapi kalau karet sudah besar usia lima tahun, tidak bisa ditanami tanaman sela lagi” ungkap Azis.

Pada 21 Januari 2015, barulah Perum Perhutani mengadakan sosialisasi sekaligus perekrutan pekerja, yang berlaku bagi warga Surokonto Wetan yang hendak bekerja di wilayah lahan sebagai mandor.

Padahal proses penggantian lahan (ruilslag) kawasan hutan itu sebetulnya tidak tuntas, jelas, maupun transparan. Sebagaimana diketahui, lahan yang digunakan untuk mengganti kawasan hutan bukanlah lahan milik perorangan, melainkan milik negara. PT Sumur Pitu Wringinsari hanya sebatas memegang HGU.

Pada April 2015, Nur Azis bersama petani penggarap mengajukan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meminta peninjauan kembali SK penetapan kawasan hutan. Namun tak berbuah hasil. Sementara warga tetap menanam lahan, karena membiarkannya telantar malah akan merusaknya.

Desember 2015, warga kembali melaporkan kegagalan ruilslag ke pemerintah pusat. Laporan-laporan tak kunjung mendapat tanggapan, namun pada 26 Januari

2016, Perum Perhutani KPH Kendal melaporkan tindak pidana penguasaan kawasan hutan secara tidak sah di Desa Surokonto Wetan. Setelahnya, Kepolisian Resor Kendal memulai serangkaian pemeriksaan penyidikan berkaitan laporan tersebut.

Sepanjang 2015, Nur Azis dan kawan-kawannya telah beberapa kali dipanggil polisi untuk dimintai keterangan seputar pengelolaan lahan di Surokonto Wetan. Pemeriksaan pada Nur Azis dan kawan-kawannya kian intensif setelah terbit perintah penyidikan atas laporan tersebut.

Pada 30 Maret 2016, diadakan upacara penanaman pohon secara simbolik oleh Perum Perhutani di Surokonto Wetan. “Waktu itu dijaga aparat keamanan. Kami tidak bisa apa-apa, juga tidak diberi kesempatan bicara,” kata Nur Azis.

Hingga 2 Mei 2016, nama Nur Azis bersama Mudjiyono (41) dan Sutrisno Rusmin (64) dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana menggerakkan pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

“Kami kecewa, karena sejak awal kami sudah meminta melalui surat untuk meninjau kembali SK penetapan kawasan hutan itu,” kata Nur Azis.

Sementara itu, Perhutani KPH Kendal menolak memberikan konfirmasi dengan alasan bahwa SK penunjukan dan penetapan kawasan hutan dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan saat itu.

## **TERJERAT DALIH KONSERVASI**

Nur Azis, Mudjiyono, dan Sutrisno Rusmin dijerat Pasal Pasal 94 ayat (1) huruf (a) dan (b) Jo Pasal 19 huruf (a) dan (c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Mereka dituduh

menyerobot lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Jerat hukum pada tiga petani Surokonto itu menambah panjang daftar kasus masyarakat sekitar hutan yang terperangkap Undang-Undang P3H. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sejak disahkan pada 2013, telah ada lebih dari 10 kasus menjerat masyarakat adat, petani dan buruh.

Di Bengkulu, ada empat warga adat Semende Agung yang divonis tiga tahun penjara dengan denda Rp 1,5 miliar per orang atas tuduhan perusakan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Padahal mereka sudah hidup di sana turun menurun dari sebelum kawasan itu ditetapkan pemerintah menjadi taman nasional.

Jeratan UU P3H juga mengingatkan pada kisah seorang nenek bernama Asyani di Situbondo yang divonis pidana satu tahun dengan masa percobaan 15 bulan. Hukuman itu atas tuduhan dua batang pohon jati milik Perhutani. Dalam persidangan, Asyani mengungkapkan batang pohon jati itu ditebang dari lahan sendiri oleh mendiang suaminya lima tahun sebelumnya.

Sekretaris Jenderal KPA, Iwan Nurdin, mengatakan Undang-Undang P3H menjadi perangkap masyarakat yang bermukim di perbatasan atau masuk wilayah hutan. Sebab perundangan tersebut tidak mendefinisikan pembalakan secara jelas.

“Pembalakan itu dilakukan secara masif. Korporasi yang memungkinkan untuk bisa melakukan,” kata Iwan.

Di sisi lain, hingga kini perusahaan yang melakukan aktivitas merusak hutan justru tidak terjerat Undang-Undang P3H. Menurut Iwan, Undang-Undang P3H juga tidak

mempertimbangkan banyaknya kawasan hutan yang belum jelas tata batasnya. KPA mencatat, dari 130 juta hektar kawasan hutan Indonesia, sekurangnya 70 persen di antaranya belum selesai ditata batas.

“Ketidakpastian tata batas kawasan hutan itu memicu konflik agrarian antara masyarakat dengan Perhutani,” ujar Iwan.

Padahal saat ini ada 33.000 desa yang berbatasan dengan hutan di seluruh Indonesia. KPA mencatat ada 6.300 desa yang berkonflik dengan Perum Perhutani lantaran tumpang tindih lahan. Konflik masyarakat sekitar hutan dengan perhutani ini mendominasi konflik agraria di Pulau Jawa.

Kasus tumpang tindih lahan seperti itu terjadi sejak zaman kolonial. “Perhutani mengklaim bahwa wilayah pengelolaannya telah selesai ditata batas sejak zaman Belanda, antara tahun 1865 sampai 1930-an. Namun Berita Acara Tata Batas sulit untuk diakses,” kata Iwan. Jika Perhutani merujuk pada tata batas zaman kolonial, kata Iwan, tentu berbeda maksud dan itikadnya dengan tujuan kemerdekaan.

“Kami lahir di sini, besar di sini, cari makan ya di sini, kami hidup di sini. Seandainya lahan itu bisa kembali ya kami berharap kembalinya ke nenek moyang kami.”

Setelah kemerdekaan, terbit Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang dititikberatkan pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan konversi tanah yang terdiri dari sembilan pasal. Dinyatakan, konversi atas tanah yang berasal dari hak-hak barat (kolonial) selambatnya diselesaikan dalam masa 20 tahun sejak perundangan diterbitkan. Pasal 6 UUPA 1960 juga menyebutkan semua kepemilikan dan pengelolaan tanah selalu memiliki fungsi sosialnya tersendiri.

Sementara, konflik yang terjadi di Surokonto Wetan antara petani dengan Perhutani disertai dengan adanya peristiwa ruilslag lahan yang ternyata tidak jernih.

“Sebelum ada penetapan kawasan hutan, *ruilslag* seharusnya *clean and clear* lebih dulu. Perhutani seharusnya melihat itu,” kata Iwan. Setelah *ruilslag* tuntas dan dipastikan tidak menyalahi aturan, baru bisa dilakukan serangkaian proses pengukuhan.

Berdasar Pasal 15 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan proses pengukuhan kawasan hutan. Tahapan proses pengukuhan secara berurutan adalah penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, baru penataan kawasan hutan. Pengukuhan dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum kawasan hutan.

Sebelum diadakan pengukuhan, menurut perundangan tersebut, ada proses inventarisasi hutan. Dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, dan lingkungannya secara lengkap. Termasuk harus mempertimbangkan sumber daya manusia dan kondisi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Iwan mengatakan, kasus seperti yang terjadi di Surokonto Wetan itu akan terus ada selama persoalan tata batas belum terselesaikan.

“Sebetulnya telah ada peraturan bersama tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan,” kata Iwan. Peraturan yang disepakati Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional ditetapkan pada 17 Oktober 2014.

Di dalamnya memuat tata cara penyelesaian hak ulayat

dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan, inventarisasi penguasaan pemilikan penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan. Perubahan kawasan hutan, integrasi kawasan hutan dalam rencana tata ruang wilayah, pemanfaatan tanah dan batasan luas.

Dengan kerapnya masyarakat sekitar hutan yang terjerat Undang-Undang P3H, menurut Iwan, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan peraturan bersama tersebut. "Kalaupun belum dianggap kuat untuk diimplementasikan, maka harus didorong menjadi lebih kuat, seperti peraturan presiden," ujar Iwan.

Terhadap kasus yang terjadi pada Nur Azis dan kawan-kawan, Iwan berpendapat DPRD serta BPN setempat sedianya memberikan perhatian dalam penyelesaiannya.

Sedangkan, masyarakat Surokonto Wetan terutama para petani yang menggarap lahan HGU PT Sumurpitu itu, menghendaki pencabutan SK penunjukan dan penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan. Mereka meminta hak pengelolaan lahan secara berdaulat dan berorientasi kesejahteraan seperti yang diamanatkan UUPA 1960.

Mereka turut mendesak pemerintah melakukan tindakan hukum pada pihak-pihak yang telah menjual tanah negara. Serta meminta pencabutan status tersangka atas Nur Azis, Mudjiyono, dan Sutrisno Rusmin.

"Kami lahir di sini, besar di sini, cari makan ya di sini, kami hidup di sini. Seandainya lahan itu bisa kembali ya kami berharap kembalinya ke nenek moyang kami," kata Nur Azis.



**Anang Zakaria**

Jurnalis yang berbasis di Yogyakarta. Saat ini menjadi kontributor untuk Beritagar.id. Sebelumnya bekerja untuk Tempo.

# PARA SRIKANDI PENJAGA BUMI

Oleh: **ANANG ZAKARIA**

Dimuat dalam Beritagar.id pada 17 September 2016

*Pemerintah Yogyakarta berencana memindahkan bandara Adisutjipto ke daerah Kulonprogo. Warga menolak karena wilayah yang kena merupakan lahan produktif.*

**W**agirah berlari-lari kecil. Ia pulang ke rumah dan kembali datang dengan semangka sebesar bola basket dalam dekapan. “Ini beratnya enam kiloan. Biasanya ada yang sampai sembilan kilo (kilogram),” katanya, Jumat (2/9/2016) sore.

Perempuan 49 tahun itu warga Dusun Sidorejo Desa Glagah Kecamatan Temon, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hampir tiap sore sepulang bekerja di ladang, ia mampir ke rumah tetangganya, Sutarmi (51 tahun). Di sana, biasanya sudah berkumpul perempuan sebaya. Seperti sore itu, setidaknya ada tujuh perempuan duduk melepas penat usai bekerja di teras rumah Sutarmi.

Wagirah ingin memperlihatkan betapa subur tanah desanya. Semua jenis tanaman bisa tumbuh. Ia menanam semangka, jagung, cabai, terong, dan oyong di ladang sepanjang tahun. Kadang sayuran dan buah itu ia tanam

bergantian sesuai musim, tapi tak jarang ia menerapkan sistem tumpangsari.

“Di sini musim hujan tak banjir, musim kemarau air masih mengalir,” katanya. Selain tanah yang subur, sistem irigasi pun mumpuni mengairi lahan pertanian. “Jadi kurang apalagi petani di sini.”

Tanah impian nan ideal bagi petani itu terusik sejak lima tahun silam. Pada 2011, pemerintah berencana membangun bandara di sana. Bandara baru itu untuk menggantikan Bandara Adisutjipto di Maguwoharjo, Sleman, sekitar 50 kilometer dari Temon, Kulonprogo.

Butuh lahan seluas 645,63 hektar untuk membangun bandara. Pemerintah merencanakan bandara itu akan meliputi lima desa di Kecamatan Temon; Jangkar, Sindutan, Palihan, Kebonrejo, dan Glagah. Dari kelima desa itu, Glagah menjadi desa terdampak paling luas. Luas Glagah mencapai 603,94 hektar. Dalam dokumen sosialisasi tertanggal Desember 2014 yang diterima warga, setidaknya ada 100 hektar tanah di Glagah yang terdampak pembangunan bandara.

Sundari (35 tahun), warga Glagah, mengatakan ada lima dusun di desanya yang terdampak pembangunan bandara. Sidorejo, Macanan, Kretek, Bapangan, dan Kepek. “Sawah, ladang, dan rumah di Bapangan dan Kepek itu kena semua,” katanya.

Penduduk Glagah berjumlah 2.820 orang. Umumnya mereka bekerja sebagai petani. Lahan pertanian di desa ini bisa dibagi menjadi dua. Di utara Jalan Deandles, lahan didominasi persawahan. Sementara di bagian selatan jalan umumnya tanah tegalan. Berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, Glagah menampilkan sepotong keindahan pantai selatan Jawa.

Sebagian besar penduduk dewasa di Glagah (2.157 orang)

merupakan kaum perempuan (1.100 orang). Mereka ikut turun ke ladang dan sawah menanam palawija dan padi bersama kaum lelaki. "Selain urusan domestik, kaum perempuan di sini juga membantu suami bertani," katanya.

Wagirah misalnya. Bersama suaminya, ibu dua anak itu ikut mengolah lahan pertanian seluas 500 meter persegi. Di lahan itu, ia bisa menanam padi dua kali dalam setahun. "Hasil panennya tak habis dimakan dua tahun," kata Wagirah.

Selain padi, ia juga menanam semangka. Dengan masa tanam 55 hari, ia bisa memanen semangka dua bulan sekali. Sekali panen, ia bisa mengantongi uang penjualan hingga Rp 7 juta.

Dari bertani itulah ia menghidupi dan menyekolahkan anaknya. Kini seorang anaknya sudah tamat sekolah dan bekerja. Sementara seorang lagi masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). "Kalau nanti dibangun bandara, petani seperti saya mau kerja apa," katanya.

Dari lahan pertanian pula warga tak bertanah menghidupi keluarga. Sutarmi salah satunya. Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tak memiliki sawah. Toh, ia masih bisa mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh tani. Saban hari ada saja tetangga yang meminta bantuan tenaganya. Dari menanam dan memanen di sawah hingga sekadar menyiangi rumput dan membersihkan tegalan. "Itu (upahnya) sudah cukup untuk menghidupi anak saya," ujar Sutarmi.

Bagi Sutarmi, juga Wagirah dan Sundari, bandara tak sekadar menggusur rumah dan lahan pertanian. Ia yakin petani seperti dirinya akan tersisih. Selain usia, tak ada keterampilan lain yang mereka miliki selain bercocok tanam. "Saya kira tak mungkin orang sini bisa bekerja di bandara," katanya.

Sejak setahunan lalu, sebagian kaum perempuan di

Glagah membentuk “Perempuan Pejuang Anti Penindasan”, salah satu organisasi yang getol menolak kehadiran bandara di Temon, Kulonprogo. Sundari didapuk menjadi ketuanya. Anggotanya mencapai seratusan. Semuanya perempuan asal Desa Glagah dan Palihan.

Organisasi perempuan ini terbilang militan. Mereka selalu hadir dalam tiap aksi turun ke jalan menolak bandara. Anggotanya juga kreatif dalam mengkampanyekan isu kedaulatan pangan, di antaranya dengan cara membagi sebagian hasil panen pada masyarakat. “Tak usah diusik lagi, orang di Glagah ini sudah makmur,” kata Wagirah.

Ia mengatakan sejak mendengar rencana pemerintah membangun bandara di desanya, hatinya seperti tersayat-sayat tiap hari. Alih-alih menganggap sebagai berkah pembangunan yang menyejahterakan, dalam benaknya bandara adalah momok menakutkan perampas sandang, pangan, dan papannya. “Orang digusur tak ada yang makmur,” katanya.

Suami dan anaknya, juga dirinya, bingung akan kerja apa. Bagi kaum tani, menurut dia, tanah adalah alat produksi utama. “Tanpa tanah petani tak bisa hidup,” katanya.

Organisasi lain yang getol menolak pembangunan bandara adalah Wahana Tri Tunggal (WTT). Organisasi ini berdiri pada 2012, empat tahun sebelum PPAP didirikan. “Kalau WTT anggotanya bapak-bapak,” kata Sundari.

Mei 2015 lalu, empat orang anggotanya; Sarijo, Tri Marsudi, Wasiyo, dan Wakidi, dijatuhi hukuman 4 bulan penjara oleh Majelis Hakim PN Wates. Mereka dituding melakukan perusakan karena menyegel Balai Desa Glagah. Peristiwa penyegelan itu berlangsung pada 2014 saat warga penolak bandara datang ke balai desa dan ingin meminta penjelasan rencana pembangunan pada aparat desa.

Pada tempo yang sama, warga penolak bandara juga mengajukan gugatan, atas izin penetapan lokasi bandara yang diputuskan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Menang di PTUN, gugatan kandas di tingkat kasasi.

Juru Bicara WTT Nur Wiji mengatakan banyak orang beranggapan tanah pesisir pantai Kulonprogo lahan tandus. "Dulu mungkin iya tapi sekarang sudah jadi lahan pertanian yang subur," katanya.

Puluhan tahun lalu, tanah pesisir Kulonprogo adalah lahan tidur. Tak banyak orang memanfaatkan untuk bertani. Tanahnya berpasir dan sulit ditanami. Hanya pandan yang tumbuh subur. Paska kemerdekaan, perlahan orang mulai membuka lahan untuk berkebun. "Status lahannya persil merah," katanya.

Pada 1980-an, lanjut dia, pemerintah memberi kesempatan petani penggarap memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Syaratnya, warga membeli bibit pohon kelapa dan menanamnya di lahan mereka. Bibit itu dibeli dengan cara berhutang pada bank. Ketika cicilan lunas, sertifikat pun diserahkan.

Senin, 5 September 2016, Wiji mengajak beritagar. id mengunjungi lahan pertanian warga Glagah di pesisir pantai. Ia memperlihatkan betapa banyak pohon kelapa di daerah itu. Hingga nyaris mencapai bibir pantai, di antara barisan pohon kelapa, palawija tumbuh subur di ladang warga.

Siang hari itu, sekelompok perempuan sedang bersama-sama menanam cabai di atas sebidang tegalan. Di kanan dan kiri lahan, terlihat pohon jagung dan semangka baru saja dipanen. Beberapa buah semangka, kebanyakan berukuran sebesar bola takraw, dibiarkan berserakan di tepi jalan. Di

bagian lain, terlihat ladang ditanami terong. “Tanah di sini memang berpasir, tapi lihat sendiri ternyata semua tanaman bisa tumbuh,” katanya.

Agar bisa ditanami, warga mencampur tanah dengan pupuk kandang. Di Glagah, pupuk kandang bisa diperoleh dengan mudah. Karena selain bertani banyak warga beternak sapi. Adapun untuk menjamin ketersediaan air para petani membuat sumur-sumur di ladang. Meski jarak ladang dekat dengan pantai, air di sumur tawar. “Gali tanah lima sampai enam meter sudah keluar air,” katanya.

Dahulu, warga mengalirkan air dari sumur-sumur itu dengan cara menimba dan menyiramkan ke tanaman. Tapi kini, kebanyakan petani menggunakan pompa dan mengalirkan air melalui selang yang ditanam di bawah permukaan tanah.

Dengan cara itu, ia mengatakan, terbukti hampir semua tanaman bisa tumbuh subur di ladang. Ia pernah mencoba menanam cabai, jagung, semangka, oyong, terong, hingga sawi. Produktivitas lahan pun terbilang tinggi. Jika semangka bisa panen dalam 2 bulan, cabai bisa panen dalam waktu 2,5 bulan. Sementara oyong dan terong siap dipanen pada usia 1-2 bulan. Sekali masuk masa panen, kedua tanaman itu bisa dipetik hasilnya tiap hari selama 2-3 bulan.

Sejak isu pembangunan bandara santer berhembus lima tahun lalu, petani WTT dan PPAP justru semakin giat menanam lahannya. Nyaris tak ada waktu sebulan pun bagi lahan mereka berhenti memproduksi palawija. Habis tanam cabai tanam semangka. Setelah itu tanaman lainnya. Begitu seterusnya sepanjang tahun.

Bagi petani WTT dan PPAP, menanam adalah bagian dari cara menolak bandara. Dengan menanam pula mereka memperlihatkan petani berdaulat atas tanahnya. “Kami

menanam maka kami melawan,” katanya.

## **DUIT BELUM ADA, KELUARGA SUDAH TERPECAH**

Rasa senasib sepenanggungan membuat hubungan warga penolak bandara Kulonprogo kian erat. Meski tak ada pertautan darah, mereka tolong menolong bak saudara. Tapi gara-gara bandara pula, putus tali kerabat keluarga.

“Sejak Ramadan kemarin, saya tak pernah lagi ngomong dengan ibu,” kata Dahlia (45 tahun), warga Sidorejo Desa Glagah, Temon, Kulonprogo, Jumat (2/9/16) sore.

Musababnya, Tugiyah, ibu Dahlia, berkukuh akan melepas tanah keluarga seluas 500 meter persegi untuk pembangunan bandara. Sementara Dahlia berkeras mempertahankannya.

Tugiyah adalah perempuan dengan dua saudara. Orang tua mereka meninggalkan sebidang tanah ketika meninggal. Tanah warisan itu lalu dibagi tiga meski surat kepemilikannya belum terpecah.

Pada 1990-an, seorang saudaranya meninggal. Tinggallah dua bersaudara, Tugiyah dan seorang lainnya. Mereka bermufakat ngejoki (membeli) warisan milik saudaranya yang telah meninggal. Uangnya diberikan pada keponakan mereka yang telah tinggal di luar Jawa.

“Ibu saya urun Rp 1,5 juta untuk tanah itu, tapi duitnya dari saya,” Dahlia berkisah asal usul tanah yang kini menjadi pangkal sengketa dengan ibunya.

Saat ini, Dahlia telah berumah tangga. Ia tak lagi tinggal serumah dengan Tugiyah. Tapi rumah mereka berdekatan. Sumur, tempat mereka mandi dan mencuci pun masih jadi satu. Meski tiap hari papasan, toh ibu dan anak itu tak bertegur sapa.

Dahlia menolak menjual lahan itu lantaran ingin meninggalkan tanah untuk anaknya. Seperti dulu kakek dan neneknya bisa mewariskan tanah untuk ibunya. Lagi pula keluarganya adalah petani. “Kalau tak punya tanah mau menanam dimana,” katanya.

Tak hanya merusak kekerabatan dalam keluarga, masalah jual-beli tanah untuk pembangunan bandara juga menyisakan saling curiga antar tetangga. Mereka yang pro pembangunan risih bergaul dengan tetangga yang kontra. Begitu juga sebaliknya, mereka yang menolak menjual tanahnya khawatir dimatai-matai oleh tetangga mereka yang setuju pembangunan bandara.

“Dulu di sini damai tapi ada bandara jadi kayak begini,” kata Suprihatin, seorang warga Sidorejo penolak bandara.

Sehari-hari, ia berladang. Pergi ke ladang lewat depan rumah tetangga yang bersedia menjual tanahnya untuk bandara. Kalau bertemu dan harus bicara, biasanya mereka saling menjaga sikap dan tak mengumbar obrolan. Tapi, saling sindir kadang terjadi. Misalnya saat berjumpa di ladang atau sawah.

“Katanya mau dijual (ladangnya), tapi kok masih mau menanam,” katanya, menceritakan sindiran yang ia lontarkan pada warga yang bersedia menjual tanah untuk bandara. “Sudah punya duit banyak dari jual tanah kok mau kotor-kotor di ladang.”

Ketegangan antar tetangga meluas. Kegiatan sosial di masyarakat pun terpecah sesuai dengan afiliasi dan sikap warga terhadap rencana pembangunan bandara. “Syawalan pun sendiri-sendiri,” katanya.

Syawalan adalah sebutan warga untuk acara bermaaf-maafan saat lebaran. Biasanya, kegiatan itu dikemas dalam

pertemuan yang digelar beberapa hari usai Idulfitri.

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta menyebutkan menerima banyak aduan tentang konflik sosial di Temon akibat rencana pemerintah membangun bandara. “Puncaknya ya sebelum lebaran kemarin itu,” kata Nur Wahid Satrio, aktivis LBH Yogyakarta.

Menurut dia, kasus Dahlia dan Tugiyah bukan satu-satunya konflik dalam keluarga yang terjadi. Ada sengketa antara bapak dan anak, ada juga sesama saudara kandung. Musababnya sama, satu pihak menginginkan tanah dijual untuk pembangunan bandara tapi pihak lain menolaknya. “Banyak yang *jotakan* (berkelahi) seperti itu,” katanya.

Pola kemunculan konflik dalam keluarga itu pun sama. Umumnya, karena sertifikat kepemilikan tanah masih atas nama satu orang, semisal bapak atau kakeknya. Pada beberapa kasus, satu di antara dua pihak yang bersengketa dalam keluarga itu kini tak lagi tinggal di desa. Mereka bekerja dan tinggal luar daerah.

Ia mengatakan warga melaporkan ada anggota tim pembebasan lahan menelpon orang-orang desa yang kini tinggal di luar daerah itu. “Jadi warga (yang menolak menjual tanah itu) dipreteli,” katanya.

Paska proses jual-beli tanah untuk bandara pun masih berpotensi memunculkan konflik antar warga. Potensi itu muncul dari proses jual-beli tanah “di bawah tangan” antar warga. Artinya, antara pembeli dan penjual telah melaksanakan transaksi uang. Namun, sertifikat hak milik tanah masih belum berganti nama. “Di sertifikat masih pemilik lama,” katanya.

Dengan kondisi itu, posisi pembeli tanah lemah di depan hukum. Tim pembebasan lahan untuk bandara tentu lebih mengamini nama yang tercantum di atas sertifikat. Sehingga

kalau pun turun uang ganti rugi, pemilik tanah yang lama yang akan menerimanya pertama kali.

Toh, hingga berita ini ditulis, warga yang bersedia menjual tanahnya untuk pembangunan bandara masih terkatung-katung nasibnya. Proses ganti rugi lahan yang dijadwalkan pemerintah terus tertunda. Semula kabar yang beredar akan berlangsung tanggal 14 Agustus 2016. Lalu mundur tanggal 22 Agustus 2016.

“Sekarang katanya mundur lagi tanggal 14 September (2016),” kata Waluyo, warga Ngringggit Desa Palihan Kecamatan Temon, Kulonprogo, Senin (5/9/2016). Lelaki berusia 47 tahun itu bersedia menjual tanahnya untuk pembangunan bandara. Rumahnya berada persis di tepi Jalan Deandles, Desa Palihan.

Tak jauh dari tempat tinggalnya, beragam spanduk dan poster berisi kecaman terhadap proses ganti rugi lahan terpasang di pinggir jalan.

“Sebelum penetapan harga, kebijakan mengenai : relokasi tanah desa, insentif pajak jual, pemulihan ekonomi (adalah) harga mati”. Demikian salah satu tulisan yang terpampang di poster berukuran besar. Poster dan spanduk bernada sama terpasang di sekitarnya. Di antaranya “Dalih untuk kepentingan umum pemerintah jadi arogan”, “Warga tergusur disepelekan”, serta “Rencana pembangunan bandara untuk kesejahteraan masyarakat tergusur hanyalah omong kosong”.

Spanduk dan poster itu dibuat oleh warga yang bersedia melepas tanahnya untuk pembangunan bandara. Berbeda dengan warga yang tergabung di WTT dan PPAP, orang seperti Waluyo bersedia menjual tanah dengan syarat tertentu. “Kalau warga tak berteriak (syarat itu) pemerintah tak mendengarkan,” katanya, menjelaskan spanduk dan poster yang terpasang.

Saat ini, menurut dia, masih ada sejumlah persoalan yang belum terjelaskan ke warga. Kepastian uang ganti rugi dan jadwal pembayaran, serta lokasi lahan pengganti. Ia mengatakan besaran uang ganti rugi lahan berbeda-beda bagi pemilik lahan. Bahkan untuk tanah yang lokasinya bersebelahan dalam satu deretan.

“Sama-sama di tepi jalan, harganya bisa berbeda,” katanya. Satu bidang dihargai Rp400 ribu per meter, sementara bidang lainnya Rp600 ribu per meter. “Sebelahnya lagi Rp800 ribu per meter.”

Selisih harga tanah pun terbilang tinggi. Ia memberi contoh, ada sebidang tanah warga dihargai Rp600 ribu per meter. Tanah itu dipisahkan oleh sebidang tanah lain dengan jalan utama. Anehnya, tanah yang berada tepat di tepi jalan itu dihargai Rp1,5 juta per meter.

Rumah dan pekarangan Waluyo sendiri masuk dalam peta lokasi bandara. Rumahnya, seluas 8,5 meter x 7 meter, semula ditawarkan tim pengadaan lahan bandara dengan harga Rp 75 juta. Belakangan, ketika ia bersama-sama warga lain mempertanyakan dasar harga tanah dalam satu rapat, harga untuk rumahnya langsung melambung jadi Rp132 juta.

Tragisnya, meski merelakan tanahnya untuk pembangunan bandara, ia mengatakan, hingga kini tak punya rencana akan pindah ke mana dan bekerja apa. Satu-satunya keterampilannya adalah berladang. Sementara kini belum ada kepastian lahan relokasi dari pemerintah. “Mau jadi apa nanti saya tidak tahu,” katanya.

Meski tak punya rencana apapun untuk kelangsungan hidupnya, warga tak punya pilihan selain menjual tanahnya. Ia mengatakan dalam satu kegiatan sosialisasi, seorang petugas menyarankan padanya agar menjual tanahnya.

Alasannya, jika warga berkukuh menolak pemerintah bisa memaksa dan warga tak mendapat apa-apa. “Katanya ada undang-undangnya seperti itu,” katanya.

Waluyo tak tahu pasti undang-undang apa. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengambil dokumen sosialisasi yang didapatnya saat itu. “Ini Undang-undangnya,” katanya menunjuk satu halaman. Di sana tertulis “UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”.

Rasid Estrada (28 tahun), seorang pemuda warga Palihan, mengatakan meski jadwal pembayaran ganti rugi terus tertunda dan nilai ganti rugi masih simpang siur, desanya kini menjadi sasaran empuk sales kendaraan bermotor. “Ada yang menawarkan mobil ada yang sepeda motor,” katanya.

Berbagai kemudahan kredit ditawarkan. Uang muka kecil, cicilan ringan. Tak jarang warga tergiur dan menerima tawaran kredit kendaraan bermotor. “Tapi saya tak mau,” katanya.

Kenapa?” Iya kalau ganti ruginya jadi, kalau tidak bagaimana?”

Serbuan kredit kredit kendaraan bermotor tak hanya mewabah di Palihan. Wagirah mengatakan kondisi itu juga terjadi di Glagah. Alih-alih tergiur, menurut dia, petani WTT dan PPAP malah tak tertarik membicarakan besaran uang ganti rugi lahan.

“Ah, (uang yang dijanjikan) itu kan hanya tulisan. Kalau sekadar menulis Rp 15 miliar, saya juga bisa menulis.”

## **KOTA BANDARA DI PANTAI SELATAN JAWA**

Ini hari yang melelahkan bagi Didik Catur Prasetya. Setelah dari pagi hingga siang mengikuti rapat di kantor Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, ia masih harus mendatangi rapat PT Angkasa Pura I di Hotel Eastparc Yogyakarta pada sore. “(Membahas) soal bandara (kulonprogo),” kata Legal and General Affair Department Head PT Angkasa Pura I untuk Proyek Pembangunan Bandara Kulonprogo itu.

Beritagar.id menemuinya di sela rapat di Hotel Eastparc, Kamis, 8 September 2016 sore. Menjelang proses pembayaran ganti rugi lahan 14 September 2016, PT Angkasa Pura I terus menggelar koordinasi dengan berbagai pihak. Tertundanya pembayaran sebelumnya, menurut dia, karena permintaan warga menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan. “Kaitannya dengan pembebasan pajak,” katanya.

Ia memastikan proses pembayaran kali ini tak akan mundur. Rencananya pembayaran berlangsung di Balai Desa tempat warga tinggal. Kalau pun tak mungkin, pembayaran diselenggarakan di kantor bupati.

Ada tiga tahapan sebelum fisik bandara mulai dibangun. Diawali penyusunan dokumen perencanaan oleh PT Angkasa Pura I dan diserahkan ke Gubernur DIY. Dari dokumen itu, gubernur membentuk tim persiapan. Mereka menggelar konsultasi publik dan menghasilkan izin penetapan lokasi.

Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X telah mengeluarkan izin penetapan lokasi bandara Kulonprogo pada Maret 2015. Dalam surat bernomor 68/KEP/2015 itu bandara baru membutuhkan lahan seluas kurang lebih 645,63 hektar dan meliputi lima desa di Temon, Kulonprogo. Jangkar, Sindutan, Palihan, Kebonrejo, dan Glagah. “Dari sini diserahkan ke BPN dan dibentuk tim pelaksana pengadaan tanah,” katanya.

Ia melanjutkan tim pelaksana kini telah menilai harga

untuk 587 hektar lahan. PT Angkasa Pura I menyediakan dana Rp 4,1 triliun untuk pembebasan lahan. Sumber uangnya berasal dari pinjaman bank-bank plat merah.

Ia mengakui masih ada warga yang menolak pembangunan bandara dengan cara tak menjual tanahnya. Padahal harga yang ditawarkan cukup tinggi. Misalnya saja, ia memberi contoh, ada sebidang lahan yang dihargai hingga Rp100 miliar.

Ia berharap warga tak menghambat proses pembangunan. Toh, uang pengganti tanah layak dan menguntungkan karena diputuskan berdasar harga pasar. "Ini ganti wajar bukan ganti rugi," katanya.

Pembangunan bandara Kulonprogo merupakan proyek strategis nasional. Dirancang menjadi airport city, bandara itu akan menjadi penggerak ekonomi dan membawa kesejahteraan masyarakat. Selain bandara, di kawasan itu akan dibangun pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, rumah sakit, hingga lapangan golf.

Lagi pula, ia melanjutkan, Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum mengamanatkan pembangunan tak boleh terhambat. Uang pengganti lahan bagi pemilik yang menolak pembangunan bisa dititipkan di pengadilan negeri. "Kalau tanah sudah diukur dan mereka masih tak mau (menjual) akan dilakukan konsinyasi," katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kulonprogo Astungkoro menyayangkan masih ada warga yang menolak pembangunan bandara. Padahal saat ini sudah tak ada lagi tahapan untuk bicara tentang setuju atau tidak dengan pembangunan itu. "Sekarang sudah masuk momentum ganti rugi," katanya.

Pemerintah dan PT Angkasa Pura I pun sudah mempersiapkan segala bentuk ganti rugi yang tepat bagi masyarakat

terdampak. Dari ganti rugi berbentuk uang, tanah, maupun uang dan tanah. Selain itu, menurut dia, warga terdampak yang ingin beralih profesi juga akan difasilitasi melalui pelatihan keterampilan. "Ada yang minta kursus bahasa Inggris," katanya.

Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 disebutkan ada beberapa jenis ganti kerugian. Selain uang, tanah, dan pemukiman, ganti rugi bisa dalam bentuk kepemilikan saham. Sayangnya, pilihan terakhir itu tak memungkinkan dalam kasus pembangunan bandara Kulonprogo.

Astungkoro mengatakan tertutupnya peluang ganti rugi dalam bentuk saham bagi warga terdampak sudah disampaikan sejak awal. "Karena Angkasa Pura belum go public," katanya. Lagi pula, ganti rugi saham belum tentu menguntungkan karena tergantung pada perkembangan ekonomi dunia. "Saham juga belum tentu bagus."

Ia mengatakan dalam tiap proyek dan investasi besar pembangunan selalu muncul kasus-kasus penolakan dari warga. Meski ada peluang melakukan konsinyasi, pemerintah akan mengutamakan komunikasi dengan warga untuk mencapai kesepakatan. "Memang dilematis," katanya.

Kepala Departemen Advokasi LBH Yogyakarta Rizky Fatahilah mengatakan undang-undang itu memang terlihat demokratis dalam menyelesaikan persoalan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Warga bisa menyampaikan keluhan dan keberatan. "Tapi nyatanya tidak demokratis," katanya.

Sejak awal, pemerintah tak transparan menjelaskan rencana pembangunan bandara pada warga. Hanya warga pemilik tanah yang diundang. Padahal warga yang terdampak pembangunan bukan saja para pemilik tanah, tapi juga penggarap. Peluang warga mengajukan keberatan

pun tertutup. Karena lokasi bandara telah “dikunci” dengan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah meski daerah tersebut merupakan kawasan pertanian produktif.

“Kalau ada keberatan harus sesuai RTRW, (padahal) kalau RTRW sudah mengunci itu untuk bandara kan sama saja bohong.”

Ia mengatakan undang-undang memang memberikan alternatif beragam bentuk ganti kerugian. Tapi dalam praktiknya yang paling sering diutamakan adalah ganti rugi dalam bentuk uang. Warga dipaksa menerima uang meski mereka menolak menjual tanah. Mereka dipaksa putus hubungan dengan tanahnya ketika sudah menandatangani surat persetujuan dan pemerintah menitipkan uang pengganti di pengadilan.

Menurut dia, warga memang bisa mendapatkan ganti rugi dalam bentuk lain, semisal tanah pengganti. Tapi belajar dari kasus penggusuran di daerah lain, ganti rugi semacam itu hanya diterima oleh warga yang bertahan menolak penggusuran sampai akhir. “Dan warga bisa kompak kalau lewat organisasi,” katanya.





**Sasmito**

Setelah lulus dari Universitas Negeri Jakarta, ia mulai aktif menulis sebagai jurnalis profesional. Saat ini bekerja sebagai Editor di KBR. Sasmito juga aktif menjadi ketua Serikat Pekerja di KBR dan terpilih menjadi ketua Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) Periode 2016-2019.

# PENENTANG PLTU DARI ALAS ROBAN

Oleh: **SASMITO**

Dimuat dalam Kbr.id pada 14 April 2017

*“Pak Jokowi dulu sempat ke sini, tapi nelayan mau mendekat saja tidak bisa karena dihalangi sama satpam dan polisi.”*

Jakarta - Pagi di akhir Maret lalu, ratusan nelayan Desa Alas Roban Timur, Batang, Jawa Tengah, bersama puluhan aktivis yang tergabung dalam koalisi Break Free: Greenpeace, Walhi, dan Jatam, bersiap ke perairan Roban Timur. Suara langkah kaki mereka, saling bersahutan dengan kokok ayam.

Dari tepi laut, suara mesin kapal, menderu. Di sertai rintik hujan, mereka lantas menembus dingin angin laut menuju tengah laut. Tapi, bukan hendak menangkap ikan. Namun menduduki alat berat milik PT Bhimasena Power Indonesia (PBI) –yang mengerjakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara terbesar di Asia Tenggara.

Saya yang ikut berlayar, semula tak tahu kalau pagi itu menjadi hari bersejarah bagi nelayan Alas Roban Timur. Sebab tak ada tanda-tanda para aktivis bakal memanjat crane kapal setinggi 12 meter dan begitu sampai puncak, dibentangkan spanduk berlatar kuning bertuliskan; END COAL.

Desakan penghentian energi berbahan batubara ini, bukan tanpa alasan. Sriyono, nelayan setempat, mengatakan penghasilannya terus melorot akibat pengerjaan konstruksi awal PLTU Barang lantaran perusahaan membuang lumpurnya ke laut. Dampaknya, ia kesulitan mencari ikan.

“Sekarang itu perusahaan kalau membuang lumpur ke tengah laut. Nelayan yang tidak punya GPS kadang-kadang nyasar ke situ. Kalau nyasar, jaring nelayan tersangkut di lumpur dan tidak bisa diambil,” cerita Sriyono.

Sriyono –yang menjadi generasi ketiga nelayan di Alas Roban Timur, juga bercerita harus merogoh kocek hingga Rp 2 juta untuk memperbaiki jaring yang rusak karena lumpur. Belum lagi, ongkos membeli bahan bakar jadi bertambah sekira Rp 100 ribu-200 ribu dikarenakan mesti melaut lebih jauh dari biasanya.

“Kalau dulu, hanya 10 menit sampai 15 menit saja di laut bisa dapat ikan. Kalau sekarang 30 menit hingga 1 jam,” sambungnya.

Di Alas Roban Timur, ada sekitar 150 keluarga nelayan. Roban sendiri adalah nama sebuah dusun nelayan di muara Sungai Kaliboyo. Secara administratif, dusun Roban timur termasuk wilayah Desa Sengon.

Desa Sengon, berada di pinggir pantai. Rumah-rumahnya terbilang rapi dengan dinding bertembok semen. Ada pula balai pertemuan yang menjadi tempat berkumpul nelayan. Sejak turun temurun pula, tangkapan ikan mereka tak pernah berkurang. Tapi sejak pembangunan PLTU Batang dimulai pada Juni 2016, semua berubah.

Nelayan yang menolak, lalu menggelar aksi. Tak hanya itu, mereka bahkan sampai melipir ke Cilacap dan Rembang – daerah yang sama-sama digasak PLTU. Hasilnya? Kehidupan

nelayan di dua wilayah itu jadi susah. Padahal tadinya sejahtera. Para nelayan di sana, malah kadang mengejar ikan ke Roban.

Melihat potret buram itu, nelayan di Alas Roban, kian yakin menolak PLTU. Dan kian menggerakkan aksi ke pemma, kementerian terkait, hingga DPR. Namun, nol besar. Karena PLTU terus saja berlanjut.



Nelayan Alas Roban, Sriyono, bergabung dalam aksi END COAL bersama koalisi lingkungan. Foto: Sasmito

PLTU Batang sendiri merupakan megaproyek berskema

Public Privat Partnership atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha. Total, ada sembilan proyek yang ditandatangani dalam kerjasama tersebut, di antaranya PLTU Batang, Palapa Ring Barat, Jalan Tol Manado-Bitung, dan Jalan Tol Batang-Semarang.

Untuk pembiayaan PLTU Batang sebesar Rp40 triliun, pemerintah menggandeng Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Dimana pengerjaannya diserahkan pada PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) yang merupakan konsorsium Electric Power Development.Ltd (J-Power), PT Adaro Power (AP), dan Itochu Corporation.

PLTU Batang pun digadang-gadang bakal mumpuni menjaga pasokan listrik di Pulau Jawa lantaran kapasitasnya yang mencapai 2x1.000 MegaWatt. Dan dalam hitungan PT BPI, pembangkit ini akan rampung pada Juni 2020. Tapi Presiden Joko Widodo, minta dipercepat setahun.

Hingga kini, PLTU Batang masih dalam tahap pra-konstruksi; pondasi, kantor sementara, tiang pancang, serta dermaga atau sekitar 20 persen dari keseluruhan pembangunan.

Namun begitu bagi nelayan seperti Komari, mencari ikan jadi kian susah. Ia menuturkan saat musim panen, ikan justru turun drastis. Dari biasanya ia bisa meraup Rp 10 juta-Rp 15 juta sekali melaut, kini hanya Rp 3 juta-Rp 5 juta.

Sementara Sriyono, dan nelayan lainnya sudah kehabisan harap. Saat Presiden Jokowi ke lokasi ini pula, nelayan tak dibiarkan mendekat.

“Pak Jokowi dulu sempat ke sini, tapi warga mau mendekat saja tidak bisa karena dihalangi sama satpam dan polisi. Kapal-kapal kecil juga mau menyampaikan aspirasi tapi dihalangi,” tukas Sriyono.

Nelayan tak bisa dipisahkan dari laut. Dan yang mereka khawatirkan jika PLTU sudah beroperasi ikan di perairan Roban hilang karena airnya tercemar dan terganggu aktivitas PLTU.

Melanjutkan PLTU Batang, bagi nelayan sama saja dengan menghabisi generasi nelayan seperti Sriyono.

## **MENAKALIKAN ATURAN DEMI PLTU**

Terik matahari di perairan Roban Timur, Batang, Jawa Tengah, begitu menyengat. Sekitar delapan jam sudah ratusan nelayan dan puluhan aktivis koalisi Break Free: Greenpeace, Walhi, Jatam, menggelar aksi di laut lepas –menolak pembangunan Pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara.

Di tengah perairan itu, beberapa aktivis memanjat crane kapal setinggi 12 meter. Begitu sampai di puncak, mereka membentangkan spanduk berlatar kuning bertuliskan: END COAL.

“Kita ingin menyampaikan pesan yang kuat juga kepada para pendana-pendana internasional yang selama ini menjadi pemain besar di ekspansi batubara. Khususnya dana tersebut dari Jepang dan Cina. Meskipun sudah ada jaminan dan garansi dalam bentuk regulasi dan hukum kepada proyek ekspansi batubara ini. Tetapi itu tidak mengendorkan perjuangan masyarakat,” jelas Hindun Mualika, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Proyek PLTU Batang menghabiskan dana Rp 40 triliun dan didanai dari pinjaman Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Dimana pengerjaannya diserahkan pada PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) –yang merupakan perusahaan gabungan dari tiga perusahaan. Yakni dua perusahaan

yang berbasis di Jepang; Electric Power Development Co dan ITOCHU Corporation dengan masing-masing 34% dan 32%. Serta PT Adaro Power, perusahaan swasta di Indonesia dengan 34 persen saham. Sedang pemerintah, hanya calon pembeli tenaga listrik yang dihasilkan PT BPI.

PLTU Batang pun digadang-gadang bakal mumpuni menjaga pasokan listrik di Pulau Jawa lantaran kapasitasnya yang mencapai 2x1.000 MegaWatt. Dan dalam hitungan PT BPI, pembangkit ini akan rampung pada Juni 2020. Tapi Presiden Joko Widodo, minta dipercepat setahun.

Hingga kini, PLTU Batang masih dalam tahap pra-konstruksi; pondasi, kantor sementara, tiang pancang, serta dermaga atau sekitar 20 persen dari keseluruhan pembangunan.

Hanya saja, megaproyek ini dituding menabrak kawasan konservasi laut di Pantai Utara Jawa. Itu mengapa ratusan nelayan di sana, protes. Sebab merekalah yang bakal kena imbasnya.

“Terkait dengan KKLD (Kawasan Konservasi Laut Daerah) Roban Ujung Negoro. Nah itu dibuat pada tahun 2010, tapi kemudian direvisi. Peta itu digeser pada tahun 2011 dan digeser lagi pada 2012. Di mana kemudian penggeseran itu kalau kita telusuri, demi menyesuaikan dengan peta rencana pembangunan PLTU Batang,” ungkap Hindun.

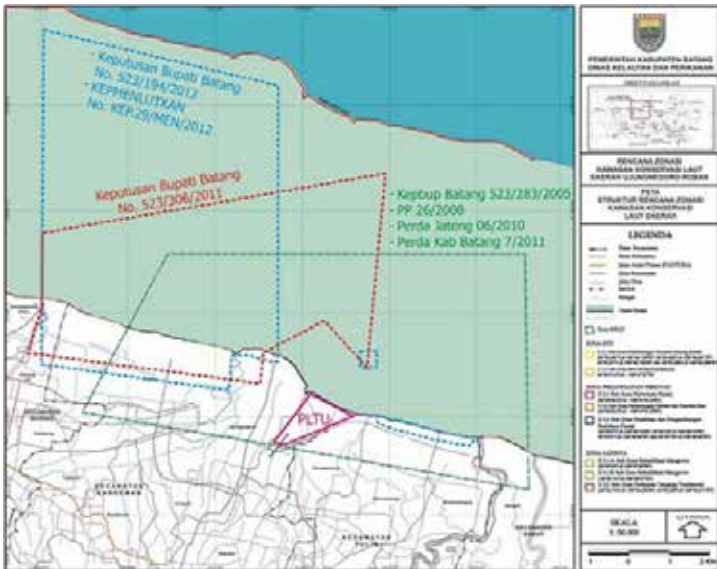
Kawasan Konservasi Laut Dasar (KKLD) Roban Ujung Negoro itu adalah kawasan perlindungan dan pelestarian terumbu karang –yang sudah sepatutnya dijaga. Hal itu pun ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005, tertanggal 15 Desember 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban, Kabupaten Batang. Luasnya 6.800 hektar dengan panjang

bentang pantai sejauh tujuh kilometer.

Dalam SK itu juga, disebutkan jenis flora berada di KKLD Roban Ujung Negro dan harus dilindungi; cemara laut, ketapang, bakau. Sementara faunanya; kira-kura blimbing, udang lobster, hiu macan, dan lumba-lumba darat.

Tapi apa yang terjadi? Demi PLTU Batubara, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudiby, pada 2012 merevisinya. Sehingga luasan kawasan itu menjadi 4.015 hektare. Yang meliputi wilayah laut 3.480 hektare dan darat 534 hektare.

Ini terlihat dari Peta Struktur Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah. Dimana Kawasan Konservasi Laut Dasar (KKLD) Roban Ujung Negro bergeser dari timur ke barat laut –demi memberi ruang pada megaprojek puluhan miliar itu.



Peta Struktur Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Laut Daerah. Foto: Greenpeace

Menanggapi tudingan itu, PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) mengaku sudah memperhitungkan berbagai aspek termasuk lingkungan dalam pembangunan pra-konstruksi. Melalui pesan pendek, Juru Bicara PT BPI, Ayu Windyaningrum, menyebut sudah mengantongi semua memenuhi semua persyaratan.

“Soal pembangunan dermaga sudah memperhitungkan berbagai aspek, termasuk lingkungan. Demikian juga dengan berbagai perizinan, semuanya telah dipenuhi. Untuk nelayan, kami juga membuat rumah ikan sebagai habitat buatan untuk ikan dan sudah dipasang atau ditenggelamkan di laut dari akhir Januari 2016 lalu. Pembuatan rumah ikan sampai pemasangan melibatkan nelayan, dengan menggunakan kapal-kapal nelayan juga. Sosialisasi ke nelayan juga dilakukan beberapa kali untuk menjelaskan program,” papar Ayu Windyaningrum.

Sementara orang nomor satu di Kabupaten Batang terlihat tak pusing dengan permasalahan yang dialami nelayan. Menurut Pelaksana tugas Bupati Batang, Nasihin, pembuangan lumpur hanya bersifat sementara.

“Memang dibuang di laut. Tapi yang jelas semua aspek kegiatan di sana sudah dianalisis dampak lingkungannya. Kalau sudah selesai ya dibersihkan lumpur itu,” kata Nasihin.

Nasihin juga menampik tudingan Greenpeace yang menyatakan Kawasan Konservasi Laut Dasar (KKLD) Roban Ujung Negro, sengaja diperkecil demi PLTU Batubara.

“Masalah konservasi dan lainnya sudah selesai dan diubah. Dan tata ruang launya sudah diubah sesuai aturan yang berlaku. Pendek kata tidak ada pelanggaran aturan-aturan terkait dengan konservasi itu,” ujar Pelaksana tugas Bupati Batang, Nasihin.

Kendati demikian, Nasihin akan menagih komitmen PT BPI jika nantinya kerugian-kerugian nelayan Roban Timur terbukti karena pembangunan PLTU Batang. “Sesuai dengan janji awal komitmennya kalau memang menimbulkan kerusakan, perusahaan bersedia mengganti. Nanti kita cek, kalau betul-betul merusak perusahaan akan mengganti.”

Di sisi lain, kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika, kelanjutan PLTU Batang membuktikan Indonesia tidak memiliki komitmen terhadap Kesepakatan Paris. Padahal Indonesia bersama 171 negara lainnya sudah menandatangani kesepakatan tersebut di New York, Amerika Serikat, pada April 2016.

“Kalau kita mengacu pada Paris Agreement untuk menghindari kenaikan suhu bumi sampai dua derajat celcius per tahun itu harus terjadi dekarbonisasi hingga 2020. Berarti sudah tidak boleh ada lagi PLTU-PLTU baru,” tegas Hindun.



**Nurika Manan**

Setelah lulus dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ia terjun di dunia jurnalistik sejak tahun 2012, kini bekerja sebagai Radio Journalist untuk KBR.

# TAMBANG SEMEN MEMBELAH REMBANG (I)

Oleh: **NURIKA MANAN**

Dimuat dalam Kbr.id pada 12 April 2017

*“Di sini mayoritas petani, kalau lahan pertaniannya hilang, apa yang mau dilakukan para petani?”*

KBR, Jakarta - “Ini juga dipakai, Peng?” tanya lelaki berkaos abu dengan udeng biru bercorak, seraya menggerakkan kepalanya menunjuk karung bertulis Indocement.

“Iya, semua. Semuanya lah dipakai, nanti dikira didukung asing,” jawab kawan yang ditanya berseloroh diiringi tawa.

Lelaki berkaos abu tadi bernama Supiyon. Sedang yang dipanggil ‘Peng’, kependekan dari ‘kerempeng’ alias kurus, adalah Joko Prianto, Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang. Tubuhnya memang kurus.

Keduanya adalah petani asal Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Rembang. Februari lalu, saya bertemu Supiyon di desanya usai memanen jagung. Pertengahan Maret ini kami bertemu lagi. Kali ini dia tidak sedang menanam atau memanen, melainkan mengaduk semen, pasir dan air. Bukan di sekitar ladang di desanya, melainkan di depan Istana Negara.

Senin 13 Maret 2017 dini hari, Supiyon dan Joko Prianto tiba di ibukota, bersama puluhan petani lain dari pelbagai daerah di deret Pegunungan Kendeng Utara. Tujuannya, bertemu Presiden Joko Widodo: menagih janji penghentian izin pertambangan dan pabrik semen di Jawa Tengah.

“Kami ingin hidup di daerah yang tenang, tidak ada kerusakan lingkungan. Aksi ini suatu bentuk ketidakpercayaan kami terhadap pemerintahan Jokowi. Tuntutan kami, Kendeng bebas dari tambang dan pabrik semen, dan terutama tutup pabrik semen di Rembang,” kata Joko Prianto, akrab disapa Print, di depan Istana Negara kepada KBR.

Pada Agustus 2016, Presiden Joko Widodo memerintahkan penundaan seluruh izin pertambangan hingga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng Utara, rampung disusun. Kajian menyeluruh ini bakal mengukur daya dukung lingkungan di kawasan tersebut. Memagari segala kegiatan dan kebijakan pemerintah agar tak merusak lingkungan.

Namun belum rampung itu kajian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah menerbitkan izin lingkungan baru untuk PT Semen Indonesia. Keruan sebagian petani itu *muntab* (marah-red). Jangan lupa, izin lingkungan perusahaan semen negara itu sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Agung. Hakim menilai, proses perizinannya cacat prosedur lantaran terdapat beberapa hal yang tidak diakomodasi dalam dokumen tersebut. Yang jadi sorotan adalah soal pembatasan dan tata cara penambangan batu gamping pada kawasan Cekungan Air Tanah (CAT), serta solusi konkret terhadap beberapa masalah kebutuhan warga semisal air untuk pertanian.

“Keresahan kami banyak sekali, termasuk hukum yang tidak ditaati. Kami tidak akan berhenti aksi sampai tuntutan kami dipenuhi: menghentikan segala proses tambang dan

pabrik semen.” kata Joko Prianto, Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng.

Tak mengerti harus melawan dengan apalagi, bulat sudah tekad petani. Aksi memasung kaki dengan semen kembali dilakukan untuk kali kedua - yang pertama digelar April 2016. Kali ini, pasung takkan dilepas sebelum tuntutan bertemu Presiden Joko Widodo terpenuhi.

## **MENUNGGU GILIRAN DIPASUNG**

Terik matahari terpantul dari kaca-kaca kendaraan roda empat yang lewat di Jalan Merdeka Barat. Kursi lipat dengan dudukan hitam, dijajar. Kotak kayu persegi diletakkan di depan masing-masing kursi. Beberapa karung semen dengan berbagai merek teronggok di sampingnya. Terpal pun digelar. Sepuluh petani berderet dari selatan ke utara, duduk di kursi yang sudah dipacak, dengan caping menghalau sinar matahari sore.

Sukamdi, petani berusia 65 tahun, duduk di deret paling utara. Suparmi di sebelahnya, menopangkan kedua tangan di lutut. Sementara pemilik mata yang kerap sayu, Sukinah, memimpin koor nyanyian Ibu Bumi melalui megaphone. Mereka menunggu giliran.

“Tidak deg-degan, karena ini bagian dari perjuangan. Seperti zaman Pak Sukarno, tidak takut mati. Pokoknya saya akan melawan pabrik semen!”

Sariman, petani asal Pati yang duduk di ujung paling selatan, mendapat giliran pertama disemen. Di kampungnya, ia melawan pendirian pabrik anak perusahaan Indocement, PT Sahabat Mulia Sakti. “*Pokoke Jawa Tengah iku kudune ora ono pabrik* (Pokoknya Jawa Tengah itu semestinya tidak ada pabrik semen-red),” katanya.

Tangan Joko Prianto, Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, lantas menyekop adukan semen, memasukkannya ke kotak persegi berisi sepasang kaki Sariman. Lelaki sepuh itu terlihat tenang.

Pada hari yang sama, di istananya, Presiden Joko Widodo melantik 17 duta besar. Presiden juga sempat menemui petinggi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Di seberang istana, puluhan petani menunggunya.

Pada hari pertama aksi, baru 10 petani yang disemen kakinya. Jumlah terus bertambah setiap hari sampai mencapai 50 petani pada aksi hari kelima. Pekan kedua, bertambah lagi solidaritas dari relawan lintas organisasi, menjadi 60 orang. Saban hari, dari siang hingga petang, mereka bertahan di seberang istana. Tapi meski sudah lewat hari kelima, tak jua ada sinyal dari Presiden untuk menemui mereka.

Dan aksi hari itu sebetulnya telah memasuki tenggat permakluman. Pasalnya, tim dokter menyarankan agar aksi pasung tak lebih dari lima hari. Jika lebih dari itu, aliran darah yang tak normal bisa merusak kaki mereka.

Pada hari kelima, jari-jari kaki beberapa petani mulai membengkak. Giyem, petani perempuan asal Pati, merasakan panas di sekitar kaki yang dibenamkan. “Kalau dirasakan ya pegal, panas, capek pasti ada. Cuma kan lebih pegal, dan capek lagi kalau pabrik semen di Jawa Tengah ini tidak langsung dihentikan,” ungkapnya dengan nada suara yang tegas.

Tidak saja pegal dan panas. Roso, petani lain, merasakan kakinya mulai dingin. Kondisi demikian terjadi lantaran aliran darah tak lancar, apalagi di bagian kaki. Tapi seolah hendak menguatkan diri, Roso mengaku kembali membaik setelah istirahat.

“Saya disemen hari kedua. Hari kedua di depan di Gedung (Istana-red) sana. Kondisinya saya sehat. Tapi memang hari ketiga di sini dicek kurang sehat, sejak jam 6. Tapi memang jam 7 di cek lagi sudah normal lagi. Saya nggak takut. Mikirnya sih, jangan sampai dibongkar. Saya pengennya sampai ketemu Bapak Presiden,” ujar Roso.

Bukan cuma soal kesehatan, aksi pasung kaki ini membatasi ruang gerak mereka. Malam-malam di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tempat petani bermalam harus dilalui dengan bantuan troli. Minimal perlu tiga orang dewasa untuk mendampingi petani yang ingin buang hajat. Itu sebab, petani dan relawan lain yang tak dipasung, berjaga bergantian 24 jam.

Petani-petani itu sebelumnya sudah melawan, mulai dari aksi damai hingga proses hukum puluhan kali sidang. Gugatan pun telah dimenangkan bahkan di lembaga peradilan tertinggi. *Toh*, izin baru untuk tambang dan pabrik tetap saja bisa terbit, kata Sukamdi.

“Saya kepengen ditemui sama Bapak Presiden. Dulu memang sudah ada perwakilan bertemu. Tapi kenapa sudah diputuskan bapak presiden, warga itu sudah menang, tapi kenapa kok (oleh Pak Ganjar) izin itu keluar lagi?” ujar Sukamdi, petani berusia 65 tahun.

Hingga tiba hari ke delapan, memasuki pekan kedua, datang pesan dari Istana. Perwakilan Petani Kendeng diminta ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Sebelumnya, KSP juga memanggil pihak PT Semen Indonesia. Tapi tak ada kesepakatan usai pertemuan itu. Petani Kendeng merasa, tuntutananya belum terjawab.

KSP mengimbau warga untuk menghentikan aksi dan menunggu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pegunungan Kendeng Utara, rampung disusun.

“Kami disuruh menunggu, hormati keputusan hasil KLHS. *Lho* kami malah yang lebih komitmen. Yang melanggar kan gubernur. Ketika melanggar apa dibiarkan?” kata perwakilan Petani Kendeng, sekaligus Koordinator JMPPK Pati, Gunretno, mempertanyakan.

Para petani memilih tak mengikuti imbauan KSP. Aksi ‘Dipasung Semen’ di depan Istana terus berlangsung. Hanya sembilan orang yang akan bergabung di sana, sementara sebagian warga pulang ke kampung halaman.

Belum sampai rencana terlaksana, kabar duka datang dini hari pada hari kesembilan, 21 Maret 2017. Salah satu petani, Patmi, meninggal kena serangan jantung. Pagi itu juga, jenazahnya langsung diboyong ke Desa Larangan, Tambakromo, Pati.

Petani-petani itu sebetulnya hanya tak ingin kehilangan lahan, air, dan penghidupannya.

“Dicor ini sakit, bukan kok nggak sakit, sakit ini. Tapi biarpun sakit seperti apapun, saya ingginnya Gunung Kendeng dilestarikan untuk pertanian. Kalau gunungnya habis untuk pertambangan, nanti (kami) kekurangan air,” tukas Darto.

## **TANAH SUBUR ITU BERNAMA TEGALDOWO**

Pria di depan saya bergegas menyimpan telepon genggam ke saku celana warna dongker. Teleponnya itu dibungkus plastik. Barangkali agar barang elektronik tersebut tak rusak kena air atau kotor karena tanah sehabis panen. Langkahnya cepat menuju lahan yang ditumbuhi jagung setinggi dua meter.

Sepasang tangan telanjang Abdullah membat satu per

satu batang jagung yang mulai cokelat. Sejak usia tiga tahun, Dullah kecil sudah diajak menanam di lahan bukit kapur di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. "Semuanya bagus tumbuh di sini mulai dari jagung, ketela, kacang tanah, pohon keras, cabai, lalu ubi jalar," ceritanya.

Pagi di bulan Februari, adalah hari ketiga Dullah memanen. Ia ditemani sang istri. Perempuan bercapung itu menutup seluruh tubuhnya, hanya tersisa muka yang kelihatan. Bersarung tangan, ia mengupas jagung, memasukkan ke karung-karung plastik.

Saban tahun panen jagung di lahannya nyaris selalu meningkat. "Tidak pernah turun, pernah stabil tapi seringnya memuaskan," kata Dullah. Kecamatan Gunem, menurut catatan Dinas Pertanian dan Pangan Rembang, memang masuk tiga besar penghasil jagung tertinggi di kabupaten ini. Tetangga desa bahkan menyebut desa Dullah sebagai 'primadona jagung'.

"Lahannya sendiri 1 hektar lebih, tapi tidak aku tanami semua. Yang aku tanam setengah hektar, yang lain ditanam pohon jati. Tahun kemarin, itu 1 hektar lebih dikit itu (hasilnya) 4,5 ton. Untuk yang sekarang belum tahu, tetapi bagus ini," ungkapnya sambil sesekali mengisap kretek di sela istirahat memanen.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rembang mencatat, pekerjaan paling banyak di kabupaten ini adalah petani. Di Tegaldowo, saat matahari belum genap tergelincir, orang-orang sudah di petaknya masing-masing. Lima hingga tujuh orang sudah memacak diri di tengah petak sawah. Dua lelaki yang membalut kepalanya dengan kaus, terlihat menghadapi kotak penggilingan padi. Ada perempuan yang menyangi rumput. Di petak lain, tiga laki dan empat

perempuan berkumpul merubung tumpukan padi.

Yang paling muda di antaranya adalah Nuryanto. Usianya baru 20 tahun. Tangan kirinya menjambak batang-batang padi, sedang yang kanan mengayun arit. Sudah dua pertiga lahan dia kerjakan. Terpal untuk menjemur gabah pun mulai digelar. Nuryanto merampungkan panen, bersama ibunya, Parmi.

“Saya bertani jagung dan padi. Sekarang dalam proses panen. Kalau yang di (ladang) atas itu, ladang saya tidak dijual, untuk pertanian saya. Di atas itu tanam jagung, baru 2 minggu. Kemarin saja panen dapat 3 ton jagung. Adalah (dapat) tujuh juta,” kata pemuda usia awal 20 tahun ini. Kegiatan macam itu berlangsung hingga sore. Siangnya, *ngaso* (istirahat) sebentar.

Kalau tiba saat panen, ladang dan sawah jadi tempat paling ramai di desa. Namun empat tahun belakangan, sebagian warga mulai dirundung cemas. Sebuah pabrik semen berdiri di tengah lahan tempat mereka menanam. Jika pabrik dibangun, pastilah tentu penambangan akan mengikuti. Rangkaian gambaran buruk soal lahan pasca tambang lantas menghantui.

Dullah menceritakan apa yang terjadi di Dusun Pancuran, Desa Tahunan, Kecamatan Sale.

“Kalau ada angin dari timur, debunya itu akan terbawa, menutup daun-daun (jagung). Akan berpengaruh ke pertumbuhan (tanaman),” kata petani Dullah.

Belasan penambangan sejak medio 1990 memang bercokol duluan di kawasan itu. Warga atau petani yang berladang di perbukitan Tegaldowo sampai hafal, saban jelang tengah hari ledakan berdentum berkali-kali.

“Dari sini ledakan itu terasa. Debu (ledakan tambang) kan menutup daun-daun. Ladang ini agak lumayan jauh, tapi

jarak dari tambang yang di situ PT BA (PT Bangun Artha) kan sekitar 400 meteran, ya pas ledakan itu pengaruh,” ungkap Dullah dengan kerut di antara dahinya.

Jika dilihat melalui peta citra, tampak atas Kecamatan Sale dan Gunem ini tak lagi sepenuhnya hijau. Di bagian timur, terlihat *growak* alias ceruk berwarna putih; menunjukkan bagian yang sudah ditambang.

Kerisauan akan tambang membuat bapak satu anak tersebut mati-matian menolak tambang dan pabrik semen sejak 2012. Tahun itu, izin lingkungan mulai diurus PT Semen Indonesia yang masih bernama PT Semen Gresik. Dua tahun setelahnya, pada 2014, perusahaan pelat merah itu memancang tiang utama proyek di Rembang. Pabriknya ada di perbatasan Desa Pasucen dan Kajar, tetangga desa Dullah. Sedang sebagian area tambangnya, ada di desanya, Tegaldowo.

Sejak tahun-tahun itu hingga kini, keberadaan PT Semen Indonesia ramai dibicarakan warga. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak tapi sembunyi-sembunyi, namun ada juga yang terang-terangan melawan. Seperti Dullah. “Kami merasakan ketika ada tambang, lahan pertanian terkikis lalu hilang. Dan tidak mungkin orang bekerja di tambang sampai umur 50 tahun itu nggak mungkin. Kalau di lahan pertanian sampai 65 tahun itu masih mungkin kerja.”

Bahkan pada tahun yang sama seperti peletakan batu pertama proyek, sebuah tenda perjuangan tolak pabrik semen didirikan di pintu masuk tapak pabrik. Warga dan petani yang menolak segala bentuk perusakan lingkungan itu lantas bergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang.

Petani lain, Nuryanto, pada tahun-tahun itu malah sampai

menancapkan papan di ladangnya, tulisannya: Tidak Dijual. Pada tahun-tahun awal PT Semen Indonesia mulai eksplorasi, tawaran membanjiri warga yang memiliki lahan di daerah perbukitan kapur di Tegaldowo.

“Kalau melihat tambang yang berada di Dusun Pancuran itu saya melihat perusakan. Yang dulunya gunung, tebing itu sekarang sudah dikeruk, rata,” kata Nuryanto, seraya menunjuk ke belakang bukit kapur.

Sebaliknya, Suwandi tak merasa gelisah. Warga Tegaldowo sekaligus staf Sekretaris Desa ini beranggapan, kekhawatiran akan kekurangan air sudah diatasi PT Semen Indonesia melalui embung yang dibuat di desanya.

“Tadinya kan kalau mau menanam padi itu sistem kering (gogo rancah), tapi kan sekarang tidak, bisa ditaraktor dan air ambil dari embung. Walaupun sekarang belum ambil air embung, kan, masyarakat kan nggak perlu spekulasi, kalau mengantisipasi sudah tanam tapi hujan tidak turun kan bisa ambil dari sana (embung),” papar Wandu.

Sementara Bupati Rembang, Abdul Hafidz merasa keberadaan PT Semen Indonesia pantas dipertahankan. Menurutnya, warga di Kecamatan Gunem akan lebih sejahtera dengan pertambangan dibanding tetap bertani. Ia bahkan menghitung, penerimaan daerah akan bertambah ratusan miliar rupiah.

“Di sana ada sawah 91 hektare, karena di atas karst produksinya tidak se bagus tanah lain. Maksimal produksinya rata-rata 4 ton padi perhektare. Kan hasilnya 360an ton itu gabah, kalau jadi beras kan tinggal 90 ton. Padahal ada 7000an orang, kalau sehari saja 2,5 ons itu ada 1750 kilo perhari, kalau setahun kan 500 ton lebih. Sementara tersedia berasnya hanya 240 ton, ditunjang panen jagung di tanah kering. Jagung

itu maksimal 3 ton 4 kwintal produksinya, dan itu kalau dipaksakan orang sana bertani, saya pastikan akan tetap miskin. Seperti pas,” papar Hafidz.

Selama ini data menunjukkan, sektor pertanian selalu mengambil porsi tertinggi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Rembang. Hafidz mengklaim, Gunem tidak termasuk lumbung pangan. Sehingga tak jadi soal jika sebagian wilayah itu ditambang.

Anggapan serupa diutarakan Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Agung Wiharto kepada KBR. Menurut Agung, Kecamatan Gunem merupakan kawasan tandus sehingga layak ditambang. “Pilihan ke Rembang juga melalui penilaian panjang. Sebelumnya kami di Pati, tapi kami tahu itu harus dilindungi maka kami cari tempat lagi. Dapatlah di Rembang. Kalau dilihat itu tanahnya tandus, bebatuan, kering,” tutur Agung.

Sepintas, pernyataan itu kelihatan masuk akal. Karena dari jauh, yang tampak di perbukitan kapur memang batuan belaka. Namun saat didekati, ada lapis tanah tipis di mana jagung anakan mulai tumbuh. Di lapis tanah itulah, Dullah dan petani lain masih menanam. Di hamparan perbukitan kapur itulah, tampak di antaranya jagung, ketela, padi, juga kacang-kacangan. “Nggak pengen dijual (lahannya). Di sini mayoritas petani, kalau lahan pertaniannya hilang, apa yang mau dilakukan para petani?” tanya Dullah.

Dan di baris-baris Pegunungan Kendeng ini pula, ada Nuryanto, Dullah, dan, orang-orang lain yang, hingga kini masih ingin menanam.

“Kami tetap ingin bertani. Kesejahteraan itu kan maknanya berbeda bagi tiap orang. Nggak sama. Orang tani, sama pegawai negeri, lalu pak polisi, pak menteri, kan beda-beda.

Haruskah semua itu sama? Jadi kami nggak ingin ada pabrik semen. Sebagai petani kami sudah merasa sejahtera.”

## **EMBUN YANG TAK SESUAI HARAP**

Dua perempuan menggosok pakaian di batu-batu di sekitar aliran mata air di Rembang, Jawa Tengah. Dari pangkal mata airnya, menjulur pipa-pipa menuju saluran air rumah-rumah warga untuk dikonsumsi sehari-hari dan pertanian.

Mata air itu adalah Brubulan Pasucen – salah satu yang ada di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Belakangan diketahui kalau kawasan tersebut masuk area pertambangan dan tapak pabrik PT Semen Indonesia.

Di CAT Watuputih pula ada 29 mata air. Ini sesuai pendataan ahli geologi dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) pada 2015, Nandra Eko Nugraha. Brubulan Pasucen adalah satu dari empat mata air yang berdebit besar. Data lain dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menunjukkan ada 154 mata air di sana. Beda lagi dengan data dari dokumen Amdal PT Semen Indonesia yang menyebut 45 mata air.

Sumber air inilah yang jadi sandaran hidup warga setempat. Karena itulah gusar langsung menyeruak begitu ada rencana tambang dan pendirian pabrik semen. Begitu tambang hadir, sudah pasti ini bakal merusak alam, termasuk mengancam keberadaan air.

Tenaga ahli PT Semen Indonesia Budi Sulistyono, yang adalah pakar pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mengklaim, puluhan mata air itu tak akan terganggu. Apalagi luas wilayah proyek dipersempit dari 520 hektar menjadi 293 hektar. Kata dia, perubahan ini telah mengeluarkan mata air dari wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Demi kehati-hatian, lokasi IUP tidak ada namanya gua, tidak ada namanya mata air. Tapi kalau di lokasi CAT itu memang ada, mata air kan di mana-mana ada. Tapi di dalam IUP, itu tidak ada. Yang jadi masalah, kenapa mata air itu seolah-olah di dalam IUP, gua di dalam IUP,” kata Budi Sulisty, tenaga ahli PT Semen Indonesia.

Namun dari uji lapang yang diteliti Nandra pada 2015, ditemukan ada dua mata air yang masuk wilayah IUP PT Semen Indonesia; mata air Belik Rotan dan Belik Sawahan. Tapi ketika KBR memeriksa adendum Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), nama kedua mata air itu tak ada di sana.

Perbedaan antara data Amdal dengan kondisi di lapangan itulah yang memicu sebagian warga Rembang menolak tambang dan pabrik semen. Penolak yang mayoritas petani, berkeras dengan alasan tambang akan mengganggu ketersediaan air. Berulang-ulang ketakutan itu disuarakan.

Tapi berkali-kali pula pihak perusahaan dan pemerintah provinsi Jawa Tengah menyodorkan klaim, pertambangan takkan mengganggu mata air. Argumen yang dipakai yakni debit air di kawasan itu ditemukan tak berubah kendati belasan tambang telah bercokol sejak 1990-an. Bahkan tenaga ahli dari PT Semen Indonesia, Budi Sulisty, menyebut pengeprasan atau pemotongan bagian atas karst justru akan mempercepat masuknya air melalui rekahan batugamping.

“Karst itu bukan kawasan lindung, tapi seolah-olah yang beredar di masyarakat itu karst adalah kawasan lindung. Karst adalah batu gamping yang berlubang, karena ada pelarutan. Kita di negara topis ya semua karst berlubang. Dan pemerintah, dengan bijaksana tidak menetapkan karst sebagai kawasan lindung. Yang kawasan lindung itu KBAK (Kawasan

Bentang Alam Karst),” sanggahnya.

Padahal, stabilnya debit air di sana justru jadi petunjuk: kawasan CAT Watuputih betul berfungsi sebagai pengatur air alamiah yang meresapkan, mengalirkan, dan mengeluarkan air hujan menjadi mata air. Debit yang stabil itu menunjukkan ada suplai yang terus-menerus dari sebuah ekosistem Watuputih. Dan kalau bagian atas dipotong, fungsi karst sebagai pengatur air alami pasti menurun.

“Karst itu menjadi satu-satunya media yang bisa menangkap air hujan secara mandiri, ada yang namanya Muka Air Tanah (MAT). Di karst itu tidak begitu berlaku, karena sifat difus dan conduitnya. Aku punya hitung-hitungan sederhana, ketika (batugamping) dipangkas 15 centimeter saja itu berapa juta liter air yang hilang.” kata Nandra Eko Nugroho, pakar geologi UPN.

Kata Nandra, dampak baru akan terasa kelak, puluhan tahun mendatang. Penurunan fungsi karst sebagai pengatur air alami membikin debit mata air akan meningkat pada musim hujan. Sebaliknya, akan turun drastis di musim kemarau. Artinya sistem penyimpanan air bakal kacau. Saat itu, petani boleh jadi tak lagi bisa mengeduk tanah demi menemukan sumber air.

PT Semen Indonesia menawarkan solusi, mulai dari membangun embung, pipanisasi sampai pembuatan sumur bor. Salah satu embung berkapasitas 16.000 meter kubik kelar dibangun di Tegaldowo, Kecamatan Gunem.

Salah satu warga, Suwandi, memiliki lahan berjarak 1 kilometer dari embung. Ia mengaku merasakan manfaat, meski belum pernah menggunakan airnya. “Walaupun sekarang belum ambil air embung, kan, masyarakat kan nggak perlu spekulasi. Kalau mengantisipasi sudah tanam tapi hujan tidak

turun kan bisa ambil dari sana (embung). Kedua, embung kan bisa menampung air sementara, jadi mengurangi banjir. Lalu, di sini kan jauh dari tempat bermain, kalau hari Minggu itu jadi tempat bermain anak (rekreasi),” kata staf sekretaris desa itu.

Namun tak seluruh petani menikmati. Nuryanto, petani Tegaldowo, mengaku sulit mendapat aliran air dari embung yang letaknya lebih rendah dari lahannya. “Dari embung sekitar 1 kilometer. Kalau mau irigasi dari sana tidak bisa, karena sawah saya lebih tinggi dari embung. Itu hanya bisa mengairi sawah sekitar. Sepertinya tidak bisa sampai sini,” ungkapnya.

Alih-alih mencukupi kebutuhan irigasi pertanian, Embung Tegaldowo tampak lebih sering digunakan muda-mudi bersantai menikmati sore. Entah sekedar duduk-duduk di gazebo atau berswa-foto. Dari kejauhan, plang nama bertulis Embung Tegaldowo menyala di antara bentangan hijau sawah. Beton artifisial bercat merah memang tampak menarik dijadikan titik berfoto, apalagi dengan latar perbukitan kapur.

Dalam adendum atau dokumen tambahan Amdal, PT Semen Indonesia memang meniatkan embung tersebut memiliki tiga fungsi; memenuhi kebutuhan irigasi pertanian, mengurangi banjir, dan menjadi tempat rekreasi. Yang terakhir nampaknya yang berhasil.

Embungnya sendiri, pada akhir Februari 2017 lalu, tak penuh. Kali-kali yang terhubung dengan embung, kering. Dengan luasan 1,3 hektar, embung hanya terisi 2,5 meter jika musim kemarau tiba. Kondisi ini tak akan terjadi ketika penampungan air dilakukan oleh karst.

“Aku akan menolak ketika hitung-hitungan risikonya akan lebih besar dibanding untungnya. Jadi ibaratnya,

pembangunan yang memperparah risiko akan kita tolak. Ketika ada pembangunan, itu akan menambah risiko ke belakangnya, kami akan bergerak,” jelas Nandra, ahli geologi dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN).

Terganggunya suplai air dari kawasan CAT Watuputih tak hanya urusan warga di lima desa ring 1 pabrik semen; Kadiwono, Kajar, Pasucen, Timbrangan dan Tegaldowo. Penelitian Nandra menunjukkan, penambangan akan berdampak pada pasokan air ke sejumlah sungai yang mengalir melewati Grobogan dan Purwodadi.

Sesuai interpretasi citra dan peta rupa bumi, CAT Watuputih merupakan hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) tiga sungai besar antara lain Bengawan Solo, Lusi dan Sungai Tuyuhan.

# TAMBANG SEMEN MEMBELAH REMBANG (2)

Oleh: **NURIKA MANAN**

Dimuat dalam Kbr.id pada 12 April 2017

*“Masak pabrik semen mau memberi (sembako) terus? Kalau sampai anak cucuku apa ya pabrik mau ngasih terus? Lhak ya enggak.”*

*“Ibu bumi wis maringi, Ibu bumi dilarani, Ibu bumi kang ngadili, La ilaha illallah, Muhammadur rasulullah... (Ibu bumi sudah memberi. Ibu bumi disakiti. Ibu bumi yang mengadili...)”*

Syair itu diciptakan Gunretno, tokoh Sedulur Sikep sekaligus Koordinator JMPPK Pati. JMPPK, kependekan dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, adalah kumpulan warga juga petani di deret Pegunungan Kendeng Utara yang menolak tambang dan pabrik semen di Jawa Tengah. Mereka kerap menyanyikan syair itu dengan nada minor pada setiap aksi protes.

Ketika saya dalam perjalanan sekitar enam jam, dari Semarang menuju ring 1 tapak pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang, nama Gunretno terpampang di spanduk berukuran 7x1 meter. Isinya: “Stop Konflik Sosial, Usir Gunretno dari Rembang”. Spanduk lain, bertulis: “Rembang Ingin Maju Bersama Pabrik Semen”.

Gunretno adalah petani asal Pati. Tapi spanduk pengusiran atas dirinya sampai ke Rembang. Agak aneh, meski dua daerah tersebut memang sama-sama menolak tambang dan pabrik semen. Di Pati, anak usaha Indocement, yaitu PT Sahabat Mulia Sakti, berusaha masuk menambang. Sedang di Rembang, ada PT Semen Indonesia.

Namun khusus di Rembang, warga di tiga desa; Kadiwono, Pasucen, dan Kajar, terang mendukung. Sementara dua desa lain; Timbrangan dan Tegaldowo, terpecah antara yang pro dan kontra. Perbedaan sikap tersebut, menurut Bupati Rembang Abdul Hafidz, terbilang wajar. Lagi pula, klaimnya, hanya 10 persen warga yang tak setuju.

“Yang saya sayangkan, sebagian kecil masyarakat ini ditumpangi pihak lain, dikompromi, dan diberi informasi yang kurang tepat. Inilah yang menyebabkan seolah-olah Rembang punya persoalan yang menimbulkan konflik, baik sosial maupun horizontal, saya pastikan dari dulu tidak ada konflik. Saya ini sudah hampir 3 tahun kehilangan sabar saya,” tukas Abdul Hafidz.

Karena itulah, ia siap pasang badan demi kelanjutan proyek dan investasi senilai Rp 5 triliun tersebut. Apalagi, pabrik PT Semen Indonesia sudah 99 persen rampung. Tabung-tabung raksasa warna perak terlihat menjulang ke angkasa. Penampakannya mencolok sebab bangunan itu terletak di tengah hijaunya hamparan sawah.

Pro-kontra tambang semen begitu terasa. Di sepanjang jalan ring 1 pabrik semen di Rembang, spanduk-spanduk saling silang terpasang berisi dukungan juga penolakan. Papan segi empat bertulis: “Kendeng Lestari” atau “Tolak Pabrik Semen” saya jumpai di beberapa rumah. Pun rumah dengan bendera PT Semen Indonesia.

Bahkan sekali waktu, ada gambar menyerupai piramida berwarna merah menempel di tembok rumah. Gambar itu logo PT Semen Indonesia. Yang begitu, pemilik rumah belum tentu mendukung. Tapi pasti, bangunan tersebut berasal dari dana CSR perusahaan.

Melihat kondisi ini, Komnas Perempuan yang beberapa kali turun ke Rembang, menemukan indikasi munculnya konflik horizontal lanjutan. Perang spanduk antar-kelompok itu jadi salah satu pertanda.

Sikap berseberangan antar-warga, bermula pada 2012—awal masuknya PT Semen Indonesia di Rembang. Dan kian kentara pada 2014; dimana warga penolak mendirikan tenda di pintu masuk pabrik, pelbagai aksi protes dilakukan—mulai dari balai desa, kantor Gubernur Jawa Tengah, hingga pengadilan.

Dan seteru ini dirasakan Murtini, warga Desa Timbrangan, yang tiga tahun belakangan menolak tambang. Imbas dari pilihannya menuai hasil; ia dilaporkan ke polisi.

“Masak pabrik semen mau memberi (sembako) terus? Memberi kan sekali dua kali, kalau sampai anak cucuku apa ya pabrik mau ngasih terus? Lhak ya enggak. Kami petani di sini itu sudah merasa sejahtera. Semua tidak beli, yang beli hanya garam, micin. Sayuran apa saja tak ada yang beli, menanam semua. Ada cabai, sayuran, jagung. Punya sendiri semua, tidak usah beli,” kata Murtini.

Perkara hukum itu, bermula dari laporan sepupunya atas pemalsuan tanda tangan penolak pabrik semen. Murtini pun mesti bolak-balik ke Polda Jawa Tengah: memenuhi panggilan sebagai terlapor.

“Kerasa banget itu, sampai saya ini kan karena menghimpun tanda tangan (penolakan) itu saya dilaporkan ke

Polda Jawa Tengah. Itu sepupu saya sendiri yang melaporkan. (Dia pro?) Dia itu, pas saya meminta tanda tangan itu juga dikasih. Awalnya dia tidak pro, tapi karena sekarang dia sudah bekerja di pabrik, jadi saya dilaporkan.” kata Murtini, warga Desa Timbrangan.

Urusan lain, dihadapi petani asal Tegaldowo, Sari -bukan nama sebenarnya. Kata dia, buah hatinya kerap dirundung teman sekolah, karena dirinya menolak pabrik semen. “Kalau sama guru tidak apa-apa, paling sama temen-temennya dirundung: ‘Ibumu tolak semen ya?’ Lalu dia bilang: ‘Mak, aku nggak seneng.’ Kan satu kelas hanya anak saya sendiri.”

Alhasil, bocah kelas 5 SD itu sering membujuknya agar berhenti menolak pabrik, berhenti aksi, dan berhenti menjaga tenda perjuangan.

Meski begitu, bagi Kepala Desa Tegaldowo, Suntono, semua persoalan tersebut lumrah. Kata dia, gesekan antar-warga hanya terjadi ketika sedang membicarakan pabrik semen. Selebihnya, warga akur-akur saja. “Nah kalau sudah ada kata-kata pabrik, itu yang kontra memang agak tersinggung hatinya. Tapi kalau komunikasi kemasyarakatan, paseduluran, tidak ada bedanya. Tapi kalau ada kegiatan tahlilan, pengajian itu biasa. Itu kami jadikan panitia bareng-bareng,” tutur Suntono.

Ungkapan serupa dicetuskan juga Suwandi, warga Tegaldowo lainnya. “Kalau di sini tidak sampai kayak yang diberitakan bahwa Tegaldowo memanas, *anu.. anu..* , itu nggak seperti itu. Sebetulnya wajar lah, masak setuju semua atau kontra semua kan ya nggak mungkin. (Pro-kontra) Itu hal yang wajar menurut saya,” tukasnya.

Dia pun menyayangkan penolakan sebagian warga. Karena baginya, selama ini PT Semen Indonesia mendatangkan

banyak faedah di desanya.

“Yang jelas dari orang pro dengan adanya PT Semen Indonesia ini sangat mendukung. Oh ada banyak (CSR-nya), termasuk WC masing-masing warga, rumah (untuk) tak layak huni. Yang jelas warga sudah merasakan. Simpan pinjam warga, pelatihan, sudah sering,” ujar Suwandi, warga Tegaldowo.

Puncak dari perpecahan ini, tenda penolak semen dirusak dan dibakar. Jumat 10 Februari 2017 lepas Isya, Murtini menyaksikannya langsung. “Saya sempat menangis, saya itu membatin: kok ya kebangetan, tega banget,” ujar Murtini.

Murtini menyesal tak punya cukup daya untuk mencegah para pembakar. Tenda beratap terpal hasil patungan warga itu pun luluh lantak. “Diangkat bareng-bareng itu kan nggak kuat, lalu doyong bangunannya. Lalu setelah itu *dipenthung*, ditimpa batu, diinjak, lalu diseret orang banyak, lalu ditumpuk dengan tenda, terus dibakar,” suara Murtini tercekat.

Tapi, meski tendanya dibakar, dan dirinya dilaporkan, Murtini masih akan terus melawan. “Sekarang ya meski sudah tidak bisa piket (jaga tenda). Tapi kalau tolak, tetap saja tolak. Ada atau tidak ada tenda, tak ada musala di situ. Awake dulur-dulur iki tetap tolak (pabrik semen),” tutupnya.

## **TERGIUR UNTUNG BATU KAPUR**

Berdiri di bawah gapura Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Rembang, mata akan tertumbuk pada deret bukit gamping, tegakan pohon, dan hamparan sawah. Berseling antara hijau, putih, dan cokelat muda. Deretan bukit itu adalah Watuputih -bagian dari Pegunungan Kendeng Utara. Sebuah bentang karst yang memanjang dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah hingga Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Sejumlah penelitian mulai dari Dinas ESDM Jawa Tengah pada 1998, hingga penelitian mahasiswa pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran pada 2015 menemukan tanda; kawasan itu berkembang menjadi morfologi karst. Dengan sistem di bawah permukaan yang amat kompleks –sehingga layaknya dilindungi.

“Kalau sungai bawah tanah kami pasti, meyakinkan. Karena berhubungan dengan mata air. Bentuk eksokarst: mata air permanen itu ada, bukit karst itu kemungkinan ada, dolina dan uvala. Telaga ya apa ada di sana? Kemudian sungai bawah tanah itu ada. Speleotem itu gua-gua yang saling berhubungan,” papar Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah Teguh Dwi Paryono kepada KBR dalam wawancara Februari 2017.

Dolina yang disebut itu adalah cekungan tertutup berbentuk lonjong juga bulat. Sedang uvala, gabungan dolina. Keduanya merupakan ciri morfologi karst. Penelitian paling mutakhir dilakukan pakar geologi UPN Veteran, Nandra Eko Nugroho pada 2015. Pendataannya menemukan ada 74 goa di kawasan itu. Sementara pengamatan berkala Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menyebut, ada 28. Sedangkan Amdal PT Semen Indonesia mencantumkan 31 gua.

Ketika di Rembang, saya menyaksikan satu dari puluhan gua itu. Diantar Wagiman hingga mulut gua, perjalanan ke sana cukup curam, ditumbuhi ilalang, bambu, dan semak berduri. Keadaan sekitar gua terasa lembab. Cahaya matahari di sekitar gua ini hanya lewat celah kanopi rimbun pepohon yang mengelilingi.

“Ini masuk, sekitar 20 meter. Turun, terus jalan biasa terus turun lagi 5 meter, baru air. Saya kasih tangga panjangnya 3 meteran itu dua kali kok. Setelah itu kan jalan biasa, lalu turun

lagi baru air,” terang Wagiman, warga Timbrangan (Februari 2017).

Gua itu bernama Menggah. Menurut Amdal PT Semen Indonesia, Gua Menggah tak masuk wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dan, memang tak masuk. Kata Wagiman dan Ngatiban yang pernah masuk, air dalam gua sekitar satu meter. Ada ikan, katak, dan serangga.

Luasan batu kapur di Kabupaten ini memang mencapai ribuan hektar. Dan, Bupati Rembang Abdul Hafidz berniat meningkatkan pemasukan daerah dengan menambang bebatuan kapur ini. “Kapur kita itu kan melimpah, ada sekitar 2.000 hektare. Kalau kita kelola dengan kedalaman 100 meter dari paling atas, itu akan ketemu 5.000 juta ton dari 2.000 hektare itu. Padahal semen itu, kalau produksinya 3 juta ton 1 tahun itu, kalau 30 tahun baru 30 juta ton, kalau 50 tahun itu 50 juta. Padahal ini ada 5000 juta ton. (Mau dimanfaatkan semua?) Nggak, artinya itu potensi di sana,” terang Hafidz.

Dia yakin, tambang kapur akan mendatangkan efek berlipat (*multiplier effect*) yang berujung pada kesejahteraan warganya. Pandangan itu bertolak pada tingkat kemiskinan yang dicatat BPS terakhir 2013. Kata dia, angka kemiskinan menurun sejak muncul pertambangan pada 1990an.

Niat yang segendang sepenarian dengan Pemprov Jawa Tengah. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Teguh Dwi Paryono mengatakan, gamping di Watuputih bisa dimanfaatkan selagi sesuai syarat. Semisal, soal batas tambang dan jaminan bahwa sistem akuifer atau penyimpanan air tak terganggu. Batas tambang aman menurut ESDM adalah tak lebih dari kedalaman 100 meter.

“Memang diatur harus selektif, unsur kehati-hatian. Ya itu yang kami masukkan. Makanya batasan penambangan itu kan

karena di situ daerah resapan. Yang masukan air ini yang kami atur," ujar Teguh.

PT Semen Indonesia, salah satu perusahaan yang antre, melalui Amdalnya memastikan hanya akan menambang di zona kering dengan kedalaman kurang dari 100 meter. Selain perusahaan pelat merah ini, tercatat ada belasan perusahaan tambang lain yang sudah beroperasi sejak 1998. Sebutlah PT Bangun Arta, PT Sinar Asia Fortuna (SAF) dan PT Indonesian Comcocrown Chemical Industry (ICCI).

Termasuk juga, Kepala Desa Tegaldowo Suntono. Dia mengaku memiliki usaha tambang kecil-kecilan sejak 2004. Hasil yang berkali-kali lipat dibanding bertani membuatnya terpincut. Hanya dari setengah hektar gamping, perbulan dia bisa mengantongi Rp 30-40 juta. Artinya, setahun bisa sekitar Rp 500 juta.

"Memang betul bumi pertiwi kita harus kita amankan. Tapi kan, ada kata-kata, lebih untung mana kita tambang dengan untuk pertanian. Kalau kita menambang setengah hektar aja bahkan 10 tahun tidak mungkin habis. Untungnya melebihi tani yang 5 hektare," kata Suntono, Kepala Desa Tegaldowo.

Dari bertani, ia mengaku hanya beroleh Rp 50 juta tiap kali panen (6 bulan), itupun dengan 5 hektar lahan. Sehingga hasil dari bertani hanya sekitar Rp 100 juta pertahun. "Kalau perkembangan zaman sekarang, ngapain kita mikir anak-cucu. Kita berusaha menyejahterakan anak sendiri dulu, nanti anak cucu dipikir anaknya lagi," tambahnya.

Dalam uji lapang dan analisis risiko, peneliti Kawasan Watuputih pada 2015, Nandra Eko Nugroho mengungkapkan, penambangan bisa merusak fungsi kawasan sebagai resapan air. Perhitungan sederhana Nandra, pemotongan 15 centimeter gamping saja dengan asumsi dua hari hujan akan

menghilangkan simpanan air lebih dari 6 juta liter.

Watuputih, menurutnya, juga merupakan kawasan imbuhan air terluas di Rembang. Penyimpanan air dari tubuhnya bisa memenuhi kebutuhan lebih dari 600 ribu (607.198) jiwa di 14 kecamatan di Rembang. “Kalau kita bicara surplus (air), air ini digunakan Rembang dan Blora, mereka hanya menggunakan air dari dua mata air untuk Rembang dan Blora. Kalau bicara pertumbuhan, setiap orang butuh 80-150 liter perorang perhari. Itu belum untuk petani, di sana mayoritas petani,” terang Nandra.

Tak hanya itu, Nandra melanjutkan, karst tak bisa diperlakukan sama seperti batuan lain. Sebab sekali morfologinya rusak, maka hancur sudah ekosistemnya. Puluhan tahun mendatang, boleh jadi gua seperti Menggah takkan lagi bisa terbentuk. Dan, rumah bagi kelelawar, serangga, katak, tak lagi ada.

“Rekomendasinya itu konservasi, salah satunya membuat geosite, geowisata, geoheritage. Ini akan mengangkat perekonomian lokal, dan sifatnya selamanya,” jelas Nandra.

Selain itu, CAT Watuputih menurut Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2010 – 2030 digolongkan dalam kawasan lindung geologi. Maka sudah selayaknya dibentengi.



# KATEGORI FOTO

NOMINASI:

<b>Uma Lengge, Menjaga Kemandirian Pangan .....</b>	<b>135</b>
Ronny Aryanto Nugroho	
<b>Panen Melimpah .....</b>	<b>137</b>
Bahauddin Raja Baso	
<b>Petani Sawi di Aceh Tengah .....</b>	<b>139</b>
Ahmad Ariska	
<b>Panen di Belakang Bandara.....</b>	<b>141</b>
Arie Basuki	
<b>Manfaatkan Lahan di Pinggir Danau .....</b>	<b>143</b>
Arifin Al Alamudi	
<b>Aroma Klasik Kopi Banaran.....</b>	<b>145</b>
Aditya Pradana Putra	
<b>Berkah Air Hujan .....</b>	<b>147</b>
Ferganata Indra Riatmoko	
<b>Ritme Magis Ritual Hudoq Pekayang: Syukur Atas Tanam Padi.....</b>	<b>149</b>
Ronny Adolof Buol	
<b>Wiwitan dan Penghormatan Pada Sedulur Sikep .....</b>	<b>151</b>
Andreas Fitri	
<b>PANEN DINI .....</b>	<b>153</b>
Muhammad Shofan Kurniawan	

PEMENANG TERBAIK:

## **Uma Lengge, Menjaga Kemandirian Pangan**

Ronny Aryanto Nugroho



**Rony Ariyanto Nugroho**

Pewartu foto Harian Kompas dari tahun 2005 hingga sekarang, menempuh pendidikan FISIPOL di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



## UMA LENGGE, MENJAGA KEMANDIRIAN PANGAN

Karya: **RONNY ARYANTO NUGROHO**  
dimuat di Harian Kompas, 7 April 2017

Indra (24) memanggul karung beras yang disebut dalam bahasa setempat Ampa Pare di halaman Uma Lengge di Wawo, Bima, Nusa Tenggara Barat, (Jumat, 30/3). Uma Lengge yang merupakan lumbung padi ini memiliki banyak kearifan lokal, mulai dari sistem ketahanan pangan hingga mitigasi bencana bagi warga, yang diwariskan sejak ratusan tahun yang lalu.



**Bahauddin Raja Baso**

Pria kelahiran Makassar, 26 Juni 1981 ini merupakan jurnalis di Harian Fajar, Makassar.



## PANEN MELIMPAH

Karya: **BAHAUDDIN RAJA BASO**  
ditayangkan di FajarOnline.com pada 13 Mei 2017

Seorang perempuan sedang memperlihatkan hasil panen jagung kuning atau jagung hibrida yang melimpah di Desa Bangkala, Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kamis, 12 April 2016. Petani jagung di Jeneponto lebih menyukai menanam jagung hibrida dibandingkan jagung punut sebab jagung hibrida lebih mudah laku di pasaran. Saat ini jagung hibrida menjadi salah satu komoditas pangan yang utama setelah beras di Kabupaten Jeneponto.



**Ahmad Ariska**

Pewartanya yang berdomisili di Aceh Besar, saat ini bekerja di Acehkita.com. Sejak jadi wartawan foto tahun 2010, Ahmad Ariska sudah pernah memenangkan beberapa perlombaan foto di Aceh, ia juga mengikuti berbagai pameran foto seperti "Pameran Foto Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 10 Tahun Tsunami Aceh Tahun 2014" dan terakhir "Pameran Foto Gempa Pidie Jaya Tahun 2016".



## PETANI SAWI DI ACEH TENGAH

Karya: **AHMAD ARISKA**  
ditayangkan di Acehkita.com, 14 Mei 2017

Foto petani sawi dipotret pada tanggal 9 Maret 2017 memperlihatkan seorang petani sedang membersihkan kebun sawi miliknya di Desa Pantan Terong, Aceh Tengah.



**Arie Basuki**

Jurnalis berbasis di Pamulang, Banten. Saat ini bekerja untuk merdeka.com.



## PANEN DI BELAKANG BANDARA

Karya: **ARIE BASUKI**  
ditayangkan di Merdeka.com, 15 Mei 2017

Sebuah pesawat melintas, saat petani melakukan panen padi jenis IR 64 di kawasan di desa Sukatani, Noglasari, Tangerang (4/9)



**Fahreza Ahmad**

Pewartu foto kelahiran Banda Aceh 36 tahun lalu ini kini aktif bekerja di beritagar.id.



## BERKAH LAUTAN

Karya: **FAHREZA AHMAD**  
ditayangkan di BeritaTagar.id, 27 Mei 2016

Dipacu dengan etos kerja, nelayan-nelayan Lhok Seudu yang giat melaut dan menebarkan jaring, membuat mereka kini mempunyai harapan untuk bangkit kembali guna membangun hidup yang lebih baik.



**Aditya Pradana Putra**

Pewartu foto yang berdomisili di Semarang, dulu menempuh pendidikan Ilmu Komunikasi di UGM Yogyakarta. Kini ia bekerja di LKBN Antara.



## AROMA KLASIK KOPI BANARAN

Karya: **ADITYA PRADANA PUTRA**

dimuat di [antarafoto.com](http://antarafoto.com), 16 Desember 2016.

Di Bawen, Kabupaten Semarang terdapat perkebunan kopi robusta seluas sekitar 400 hektare, milik perusahaan plat merah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX. Dalam setahun kebun tersebut rata-rata mengalami satu kali masa panen sepanjang Juli-November. Setiap musim panen tersebut ratusan buruh yang berasal dari daerah-daerah di sekitar kebun memetik biji-biji kopi pilihan. Selanjutnya, biji-biji kopi basah yang berkualitas diolah menjadi biji-biji kopi panggang dan serbuk kopi di pabrik milik PTPN IX yang terletak di Banaran, Gemawang, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang.



**Ferganata Indra Riatmoko**

Jurnalis yang bekerja untuk Harian Kompas, berdomisili di Salatiga, Jawa Tengah.



## BERKAH AIR HUJAN

Karya: **FERGANATA INDRA RIATMOKO**

ditayangkan di Harian Kompas, Minggu 19 Maret 2017, halaman 1

Warga keliling di desa Bandungan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sambil menyunggi kendi berisi air hujan dalam acara Dulang Sari ning Mendhung Sejati, Sabtu (18/3). Acara tersebut digelar, antara lain, untuk mensyukuri berkah dari Tuhan berupa air hujan yang melimpah. Warga desa itu memanfaatkan air hujan untuk air minum dan berbagai keperluan sehari-hari.



**Ronny Adolof Buol**

Jurnalis yang berdomisili di Minahasa, Sulawesi utara, sudah menjadi jurnalis selama 4 tahun. Saat ini bekerja di Kompas.com. Terakhir ia juga terlibat menjadi salah satu videographer dalam film Dokumenter tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sedang dikerjakan Aji.



## RITME MAGIS RITUAL HUDOQ PEKAYANG: SYUKUR ATAS TANAM PADI

Karya: **RONNY ADOLOF BUOL**  
telah tayang di Kompas.com pada 11 Juli 2017

Ribuan warga dari 13 kampung di Long Pahangai, akhir Oktober 2016, mendatangi kampung yang berada di sisi sungai Mahakam ini. Tujuan mereka sama, merayakan akhir masa tanam padi di ladang. Tradisi itu dalam budaya Dayak Bahau disebut Hudoq. Hudoq merupakan ekspresi rasa syukur kepada Sang Pencipta kala masa tanam selesai, disertai permohonan hasil ladang yang menggembirakan.



**Andreas Fitri Atmoko, S.I.Kom**

Lahir 28 Mei 1988 di Sleman. Saat ini kontributor di Kantor Berita Foto ANTARA.



## WIWITAN DAN PENGHORMATAN PADA SEDULUR SIKEP

Karya: **ANDREAS FITRI**  
ditayangkan di Antara Foto, 8 April 2017

Prosesi menuju areal persawahan di Bambanglipuro, Bantul, DI Yogyakarta. Dalam masyarakat Jawa yang sarat akan tradisi sebelum memulai panen, petani akan melakukan upacara adat 'wiwitan' atau dimulainya panen padi. Upacara adat ini menjadi simbol wujud syukur petani kepada Tuhan serta bumi sebagai 'sedulur sikep'. Bumi adalah 'sedulur sikep' bagi masyarakat



**Sofan Kurniawan**

Fotografer kelahiran Gresik ini bekerja di Jawapos Radar Mojokerto



## PANEN DINI

Karya: **MUHAMMAD SHOFAN KURNIAWAN**  
dimuat di JPNN.com , 2 Februari 2017

Seorang petani mengusung gabah di antara banjir , di Dusun Balong, Desa Banyulegi Kecamatan Dawar Blandong Kabupaten Mojokerto Jawa Timur (01/02/2017). Banjir akibat luapan sungai Lamong tersebut kerap melanda persawahan mereka, meski begitu pemerintah setempat belum melakukan normalisasi sungai. Akibat banjir yang merendam puluhan hektar ladang padi tersebut berpengaruh pada kualitas dan harga gabah, harga gabah yang semula Rp. 4800 kini menjadi Rp. 3800/kg bagi gabah terdampak banjir. Mojokerto merupakan salah satu wilayah lahan produksi padi untuk memenuhi suplai pangan, baik regional maupun nasional.